

**ANALISIS PERAN AKTOR DALAM PERUMUSAN  
PEMBANGUNAN MONUMEN AL-QUR'AN KABUPATEN  
PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Pengajuan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

**ZAKIROTUL KHASANAH**  
**NIM : 4120040**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**ANALISIS PERAN AKTOR DALAM PERUMUSAN  
PEMBANGUNAN MONUMEN AL-QUR'AN KABUPATEN  
PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Pengajuan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

**ZAKIROTUL KHASANAH**  
**NIM : 4120040**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Zakirotul Khasanah**

NIM : **4120040**

Judul Skripsi : **Analisis Peran Aktor Dalam Perumusan Pembangunan  
Monumen Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya peneliti, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Mei 2024

Yang Menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
1A96FALX124500988

Zakirotul Khasanah

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Zakirotul Khasanah

Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
c.q. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

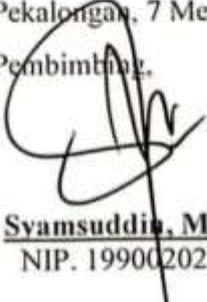
Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Zakirotul Khasanah  
NIM : 4120040  
Judul Skripsi : Analisis Peran Aktor Dalam Perumusan  
Pembangunan Monumen Al-Qur'an Kabupaten  
Pekalongan

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 7 Mei 2024  
Pembimbing,

  
Syamsuddin, M.Si  
NIP. 19900202 201903 1 011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, [www.febi.uingusdur.ac.id](http://www.febi.uingusdur.ac.id)

---

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : **Zakirotul khasanah**  
NIM : **4120040**  
Judul : **Analisis Peran Aktor Dalam Perumusan Pembangunan Monumen Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Selasa, 28 Mei 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E).

Dewan Penguji,

**Penguji I**

**Dr. Zawawi, M.A.**

NIP. 197706252008011013

**Penguji II**

**Muh. Izza, M.S.I.**

NIP. 19790726201608D1006

Pekalongan, 3 Juni 2024

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Prof. Dr. ~~Fitri~~ Chintia Dewi Rismawati, SH., M.H.**

NIP. 197902201999032001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/. Contoh:

مرأَةٌ جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/. Contoh:

فاطمة      ditulis      *fāṭimah*

## 4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddad* tersebut. Contoh:

ربنا      ditulis      *rabbanā*

البر      ditulis      *al-birr*

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      ditulis      *ar-rajulu*

السيدة      ditulis      *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر      ditulis      *al-qamar*

البدیع            ditulis            *al-badī'*

الجلال            ditulis            *al-jalāl*

## 6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostof ^/. Contoh:

أمرت            ditulis            *umirtu*

شيء            ditulis            *syai`un*

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap yang membacanya, khususnya dalam dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terimakasih dalam penulisan kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Cufrihardi dan Ibu Roliyah atas segala bentuk dukungan moral, material, doanya yang selalu mengiringi langkah putri bungsunya. Terimakasih untuk segala bentuk pengorbanan dan kasih sayang tak terhingga serta selalu memberi inspirasi dan motivasi.
2. Kakak saya Mas Nursandi, Mba Wiwit Diayati, Mba Eli Pujiati, Mas Herman Setiawan, Mba Illa Bekti, Mas Rismanto yang senantiasa memberi dukungan dan senantiasa mendengarkan keluh kesah adek bungsunya.
3. Kakak ipar saya, Mba Leha, Mas Heruwanto, Mas Santoso, Teh Neha dan juga keponakan tersayang bulek, Kaka Reva, Abang Naufal, Mas Adit, Kaka Vania, Mas Raff, dan aa' Zio yang senantiasa menghibur bulek iroh.
4. Dosen pembimbing, Bapak Syamsuddin M.Si.

5. Dosen Wali, Bapak Ali Amin Isfandiar M.Ag.
6. Almamater saya prodi Ekonomi Syariah, FEBI UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Almameter biru saya, PMII Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Almameter oren saya, HMJ Ekonomi FEBI UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Diri saya sendiri yang telah berjuang dengan pantang menyerah untuk memanager waktu menyeimbangkan diri antara kesibukan akademik dan organisasi.
10. Seluruh keluarga besar PMII Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dukungan selalu.
11. Seluruh sahabat saya yang telah mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah mewarnai kehidupan saya di dunia perkuliahan.
13. Seluruh sahabat HMJ EKOS (20021-2022), DEMA FEBI (2022-2023, PMII REBI (2020-2023) dan PMII Ki Ageng Ganjur (2023-2024) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa.

**MOTTO**

*Apa Yang Melewatkanku Tidak Akan Pernah Menjadi Takdirku Dan Apa Yang  
Ditakdirkan Untukku Tidak Akan Pernah Melewatkanku*

**Umar Bin Khattab**

*Ubahlah pola pikirmu dan kau akan mengubah duniamu*



## ABSTRAK

### **ZAKIROTUL KHASANAH. Analisis Peran Aktor Dalam Perumusan Pembangunan Monumen Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan.**

Kebijakan Publik merupakan kekuasaan pemerintah untuk menjalankan wewenangnya terhadap masyarakat umum. Kebijakan ini berjalan berdasarkan kepentingan umum guna mengatur kehidupan publik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui aktor, proses serta tujuan dari perumusan pembangunan monumen al-qur'an di kabupaten pekalongan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan berasal dari data primer dimana data tersebut berasal dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dan data sekunder yang berasal dari studi pustaka dan kedinasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diuji menggunakan teknik triangulasi data dan disusun menggunakan metode analisa data dengan tahapan reduksi data, display data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik mengenai pembangunan monumen al-qur'an adalah agenda yang berada pada tahapan program penataan kawasan alun-alun kabupaten pekalongan. Kebijakan ini dirumuskan oleh duabelas aktor yang berasal dari unsur pemerintahan tanpa melibatkan pihak lain. Hingga tahun 2024, proses perumusan kebijakan ini hanya melalui empat tahapan. Sedangkan tujuan pembangunan ini adalah untuk membuat Icon kabupaten sehingga membentuk daya tarik wilayah yang kemudian berdampak pada sektor perekonomian masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Aktor, Proses Perumusan, Tujuan kebijakan

## ABSTRACT

### **ZAKIROTUL KHASANAH. Analysis of the Role of Actors in Formulating the Development of the Al-Qur'an Monument in Pekalongan Regency.**

Public Policy is the government's power to exercise its authority over the general public. This policy operates based on public interests to regulate public life. This research aims to determine the actors, processes and objectives of formulating the construction of the Al-Qur'an monument in Pekalongan district.

This research is a type of field study research that uses a descriptive qualitative approach. The data used comes from primary data where the data comes from governmental and non-governmental elements and secondary data comes from literature and official studies. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation, then the data was tested using data triangulation techniques and compiled using data analysis methods with stages of data reduction, data display and ending with a conclusion.

The research results show that public policy regarding the construction of Al-Qur'an monuments is an agenda that is at the stage of the Pekalongan Regency square area planning program stage. This policy was formulated by twelve actors from government elements without involving other parties. Until 2024, the policy formulation process will only go through four stages. Meanwhile, the aim of this development is to create a district icon so as to create a regional attraction which then has an impact on the community's economic sector.

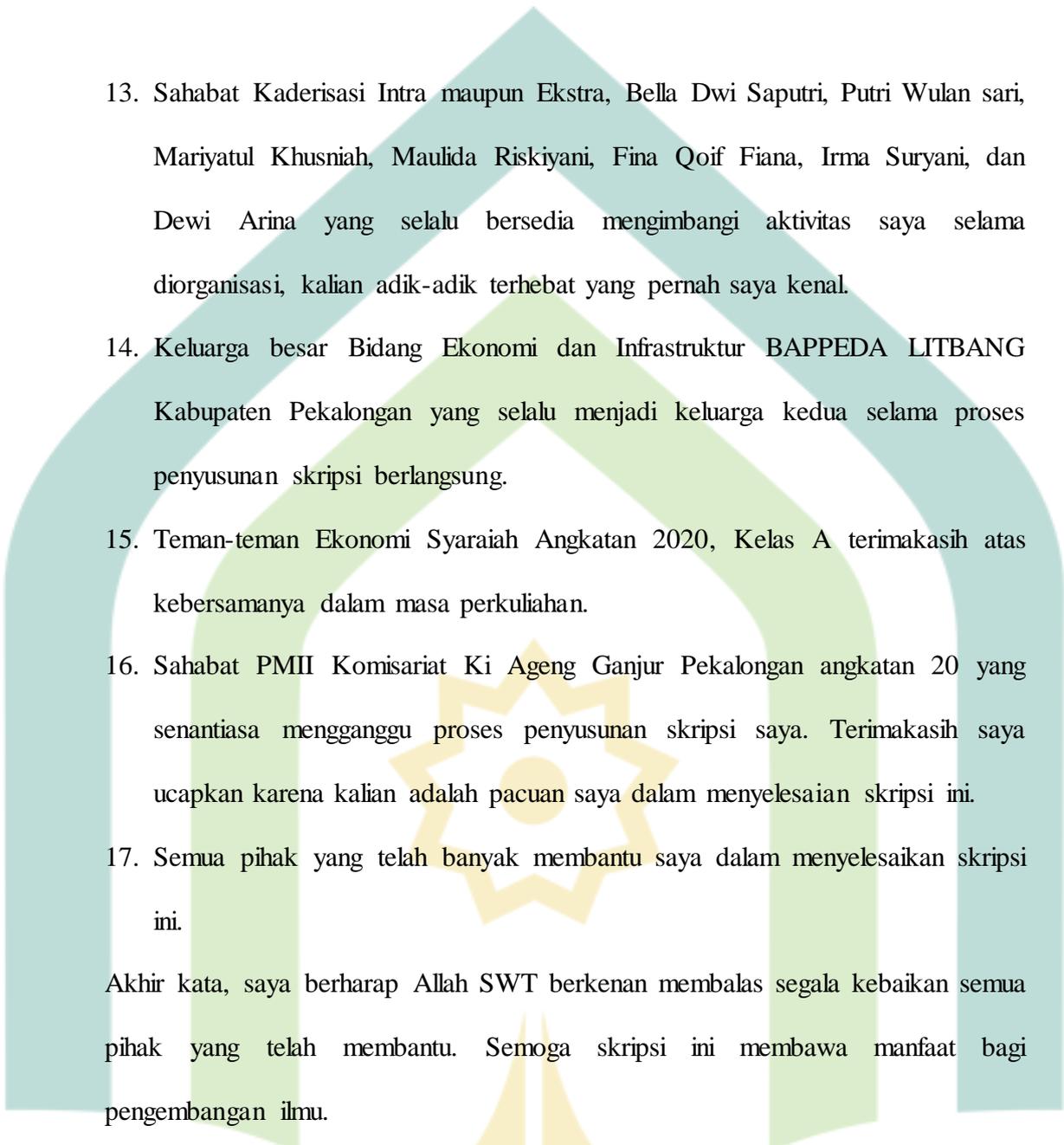
Keywords: Public Policy, Actors, Formulation Process, Policy Objectives

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Ibu Prof. Dr. Hj Shinta Dewi Rismawati., SH., M.H. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Tamamudin., M.M selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Muhammad Aris Syaff'i., M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Happy Sista Devy., M.M selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Syamsuddin, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ali Amin Isfandiar, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.

8. Seluruh Narasumber baik dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan 2021-2026 dan Pelaku UMKM yang telah menerima kedatangan saya dengan baik sehingga saya dapat memperoleh data yang saya perlukan.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Cufrihardi dan Ibu Roliyah yang telah mengajarkan arti kehidupan. Terimakasih Ibu untuk semua doa dan dukungannya dan terimakasih ayah, gelar ini bungsu berikan untuk engkau, semoga ayah bangga melihat bungsu.
10. Kakak saya Mas Nursandi, Mba Eli Pujiati , Mba Wiwit Diayati , Mas Herman Setiawan, Mba Illa Bekti, Mas Rismanto dan Kakak ipar saya, Mba Leha, Mas Heruwanto, Mas Santoso, Teh Neha serta keponakan tersayang bulek, Kaka Reva, Abang Naufal, Mas Adit, Kaka Vania, Mas Raffif, dan aa' Zio yang senantiasa memberikan dukungan dan senantiasa menghibur.
11. Teruntuk keluarga besar PMII REBI UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, terutama tokoh-tokoh yang telah memberikan banyak ilmunya, M.Fani Saifullah S.Akun, Syah Rizal Alfinudin, S.E, Sokhibul Mutaqin, S.E, Musfiroh Indah Sari, S.E, Khoirunnisa Azmi Inayati, S.E yang telah menyambut dengan baik kedatangan saya di rumah biru kuning.
12. Sahabat saya Sri Marlina, Siti Nur Kholifah, Jihan Mifta Sabilah, Nur Kholidah, Nurul Eka Setiani, Al Hayu Lestari, Sri Wulan Adiningsih, Fara Lustiani, Ahmad Sholehudin, M. Bagus Aminudin, Khoirul Huda, Indra Pratama, Zakiyah Mubarak, dan M. Shofi Anshori yang telah memberikan warna pelangi di masa perkuliahan saya.

- 
13. Sahabat Kaderisasi Intra maupun Ekstra, Bella Dwi Saputri, Putri Wulan sari, Mariyatul Khusniah, Maulida Riskiyani, Fina Qoif Fiana, Irma Suryani, dan Dewi Arina yang selalu bersedia mengimbangi aktivitas saya selama diorganisasi, kalian adik-adik terhebat yang pernah saya kenal.
  14. Keluarga besar Bidang Ekonomi dan Infrastruktur BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan yang selalu menjadi keluarga kedua selama proses penyusunan skripsi berlangsung.
  15. Teman-teman Ekonomi Syariaiah Angkatan 2020, Kelas A terimakasih atas kebersamanya dalam masa perkuliahan.
  16. Sahabat PMII Komisariat Ki Ageng Ganjur Pekalongan angkatan 20 yang senantiasa mengganggu proses penyusunan skripsi saya. Terimakasih saya ucapkan karena kalian adalah pacuan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
  17. Semua pihak yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

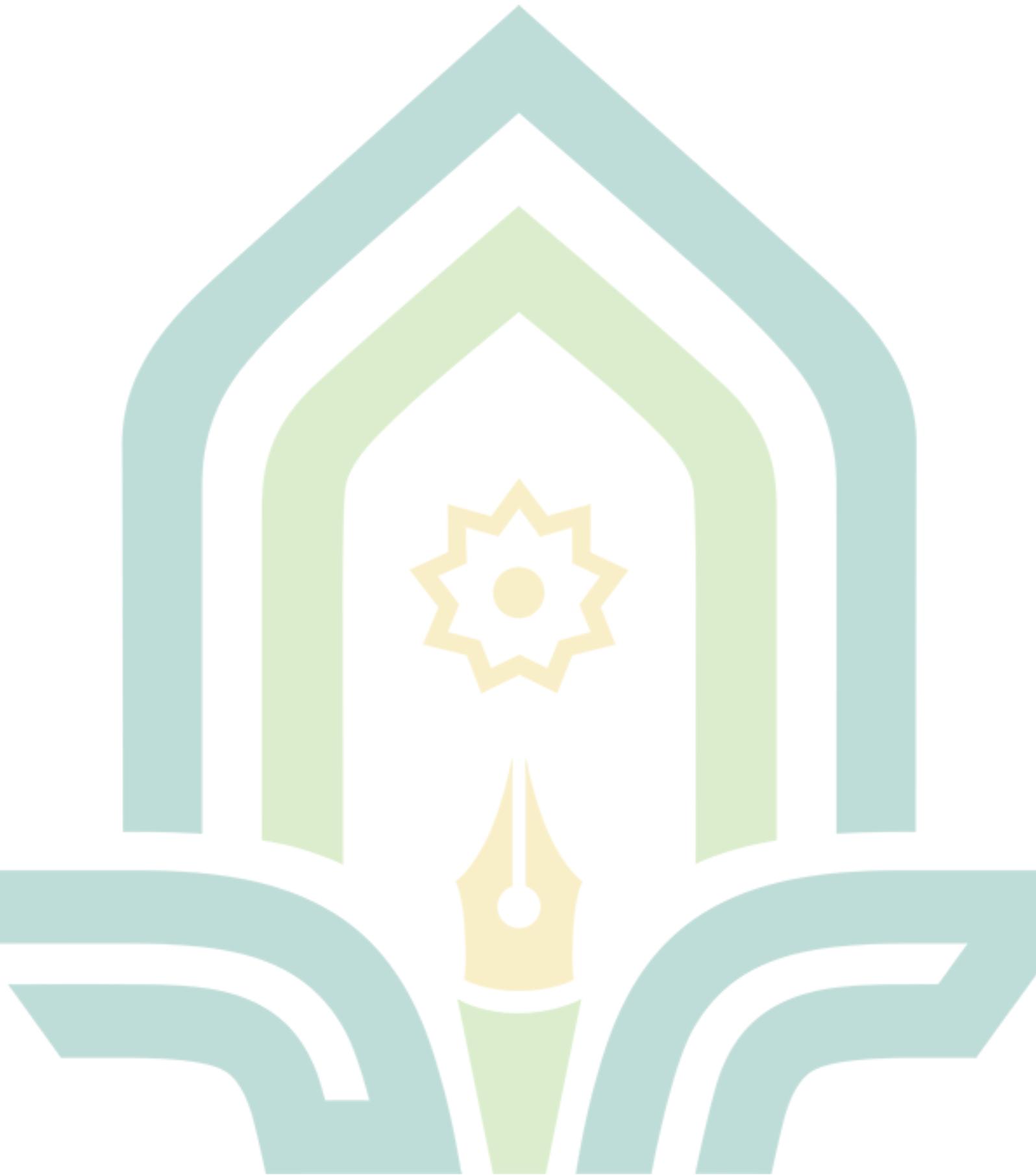
Pekalongan, 7 Mei 2022

Zakirotul Khasanah  
NIM. 4120040

## DAFTAR ISI

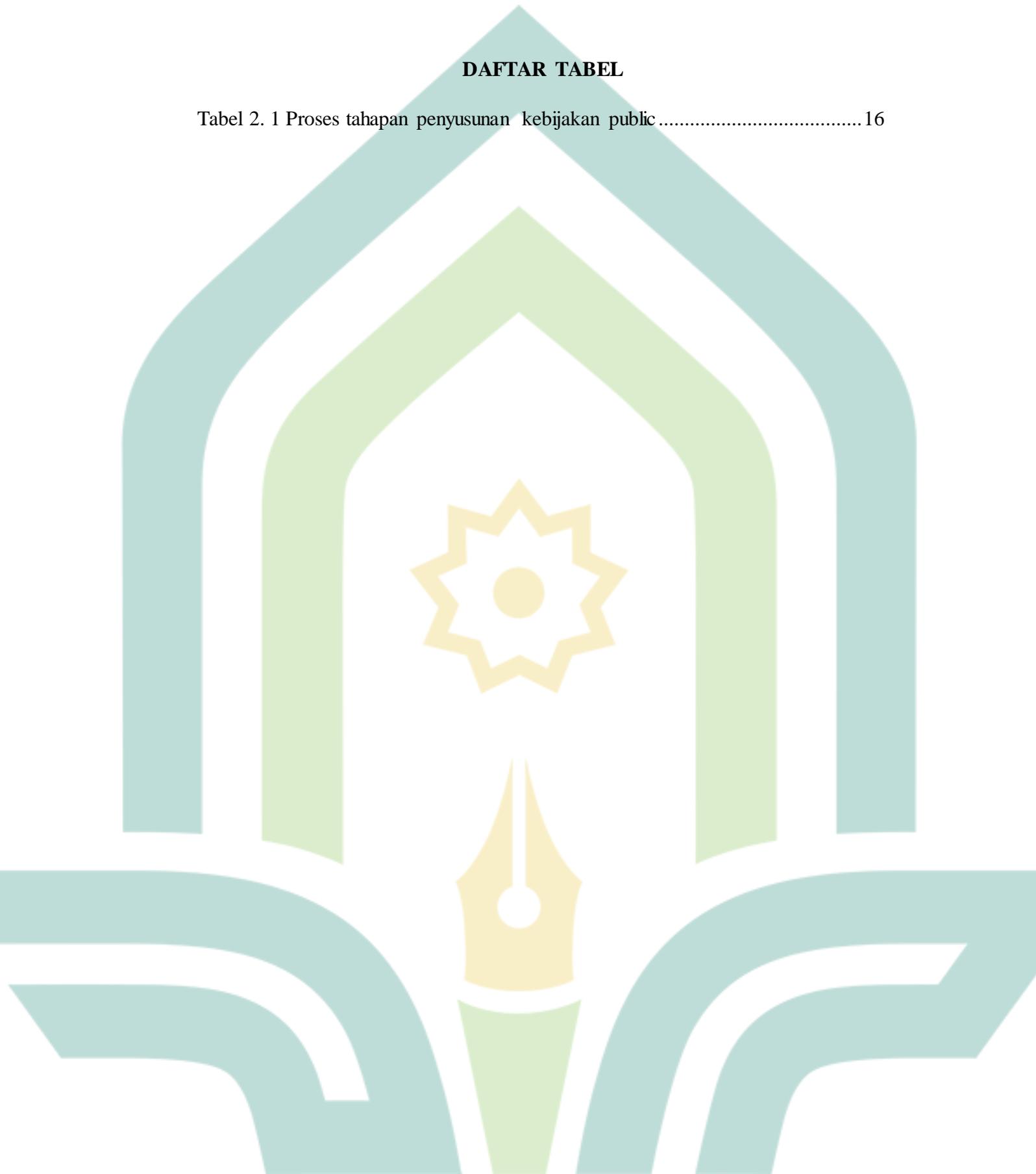
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Sistematika Pembahasan .....	12
BAB II LANDASAN TEORI .....	14
A. Landasan Teori.....	14
B. Telaah Pustaka.....	20
C. Kerangka Berpikir .....	25
BAB III METODE PENELITIAN .....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian .....	27
C. Setting Penelitian.....	28
D. Subjek Penelitian dan Sampel .....	28
E. Sumber Data .....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29

G. Teknis Keabsahan Data .....	30
H. Metode Analisis Data .....	30
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	32
B. Data Lapangan.....	38
C. Aktor Dalam Proses Perumusan Pembangunan Monumen Al-Qur'an.....	42
D. Proses Perumusan Pembangunan Monumen Al-Qur'an.....	49
E. Tujuan Pembangunan Monumen Al-Qur'an.....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
Lampiran 1 .....	I
Lampiran 2 .....	V
Lampiran 3 .....	XX
Lampiran 4 .....	XXI
Lampiran 5 .....	XXII
Lampiran 6 .....	XXXI



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Proses tahapan penyusunan kebijakan public ..... 16



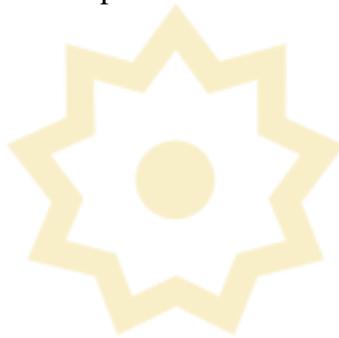
**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....25



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	I
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	V
Lampiran 3 Surat izin Penelitian.....	XX
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	XXI
Lampiran 5 Dokumentasi.....	XXII
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....	XXXI



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai hak otonomi daerah yang tertuang pada UU No 23 Tahun 2014 untuk diberikan kepada para pemimpin daerah guna mengatur keperluan pemerintahannya sendiri. Pelaksanaan atas usaha dalam mengatur wilayah ini harus dilaksanakan dengan tetap mengakui nilai supremasi dan kedaulatan negara (Sagala, 2016). Peraturan ini dibuat atas dasar pemberian kebebasan kepada seluruh wilayah untuk menangani daerahnya sesuai dengan peluang dan permasalahan masing-masing karena pada dasarnya setiap wilayah tentunya memiliki situasi dan kondisi publik yang berbeda-beda. Maka disinilah kedudukan pemerintah sangat dinilai penting untuk mengambil kebijakan atas permasalahan mana yang sekiranya harus diselesaikan. Pengambilan keputusan pada tahap penentuan agenda ini biasa terjadi dalam siklus politik yang biasa disebut dengan tahap *agenda setting* yang biasanya penentuannya disesuaikan dengan urgensi yang ada.

Urgensi proses penetapan agenda terletak pada sentralitas penentuan agenda itu sendiri. Bahwa nyatanya dalam pengambilan keputusan atas penetapan agenda ini tidak akan berlangsung tanpa peran dari para aktor politik yang mampu memperhatikan berbagai isu yang diangkat dalam kebijakan publik dan terlebih dahulu memahami proses

penetapan agenda yang harus ditempuh dalam pengambilan kebijakan publik. Sehingga dalam hal ini “Wajah kedua kekuasaan” akan terlihat terhadap kemana perhatian aktor politik itu diarahkan. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pengambilan kebijakan dan menjadikannya lebih efektif, diperlukan pola komunikasi yang bersifat saling membantu yang diimbangi dengan sikap kerja sama tanpa mementingkan golongan tertentu (Mahmud, 2020). Proses penetapan agenda dari kompleksnya permasalahan tidak terlepas dari proses politik. Berbagai permasalahan tersebut nantinya akan dikaji dan salah satu dari permasalahan yang ada akan ditetapkan untuk sebagai agenda oleh para aktor yang terlibat pada proses formulasi kebijakan. Seluruh aktor yang ada akan berupaya untuk membahas topik yang dinilai *urgent* guna menarik perhatian masyarakat sehingga berdampak ke tahap pengambilan keputusan. Tahap inipun biasanya tidak terlepas dari adanya pengaruh dari aktor-aktor pemilik kekuasaan.

Secara umum, suatu isu tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam agenda politik. Sebab jika ada orang atau kelompok tertentu yang ingin memasukkan isu tersebut, maka semua pihak yang menyusun agenda politik tersebut harus bisa mengidentifikasi masalah yang dimaksud. Sekiranya apakah permasalahan yang dibahas adalah masalah utama atau hanya masalah kecil dari sebagian besar masalah lain. Aktor yang mampu menjelaskan permasalahan secara rinci pasti akan mempunyai keuntungan dalam perdebatan yang terjadi. Hal ini disebabkan karena keputusan

agenda akan diambil ketika masalah yang dikaji dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak yang ada. Hal ini menunjukkan fakta bahwa pada tahap penentuan agenda politik pasti akan terdapat aktor yang mendominasi serta mempunyai kekuasaan yang lebih daripada aktor yang lain (Fauzi & Rostyaningsih, 2018).

Pada tahap formulasi kebijakan publik, khususnya di tahap penentuan agenda, sikap aktor adalah kunci utama untuk mempengaruhi arah kebijakan yang dihasilkan oleh aktor yang terlibat. Maka dengan ini, kajian tentang keterlibatan aktor pada proses formulasi kebijakan publik dinilai penting karena proses ini saling berhubungan dengan adanya orientasi dan keinginan dari pihak-pihak yang berperan pada tahap formulasi kebijakan publik selaku yang pihak yang memiliki kepentingan (Howlett et al., 1995).

Peran aktor pada formulasi kebijakan publik sangat penting untuk diteliti terlebih untuk wilayah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2021, Fadia Arafiq, S.E., M.M resmi dinyatakan sebagai Bupati Kabupaten Pekalongan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. Melalui kepemimpinannya, Pemkab Pekalongan memutuskan sektor infrastruktur, kesehatan dan pendidikan adalah program unggulan periode ini (Kutnadi, 2021). Pada bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melaksanakan program penyaluran bantuan seragam gratis bagi murid SD dan SMP Negeri yang terdaftar sebagai siswa kurang mampu. Selain itu, Pemerintah Kabupaten juga melaksanakan program

“Kudu Sekolah” dan dengan program ini Pemkab Pekalongan telah berhasil mengembalikan 668 ATS ke sekolah (Toni, 2022).

Sedangkan untuk program unggulan dibidang kesehatan adalah Program berobat gratis. Program ini disiasati guna menolong warga kabupaten yang masih keberatan dalam melakukan pembayaran saat berobat. Melalui program ini, mereka hanya cukup menunjukkan KTP untuk tahap administrasinya dan akan langsung mendapatkan penanganan. Selain dua bidang diatas, Pemkab juga memiliki program unggulan pada bidang Infrastruktur. Diantaranya adalah pengalih statusan jalan poros desa menjadi milik Pemkab Pekalongan dengan total sebanyak 292 titik jalan. Hal ini dimaksudkan agar Pemkab bisa mempercepat perbaikan jalan menggunakan dana APBD (Khaeruddin, 2023). Selain itu, Pemkab Pekalongan pada era Fadia Arafiq juga tetap konsisten untuk melanjutkan dan menyelesaikan program revitalisasi pasar diantaranya adalah pasar Kajen, pasar Kedungwuni, dan pasar Wiradesa. Kini ketiga bangunan tersebut termasuk Pasar Wiradesa telah diresmikan dan sudah dapat digunakan sebagaimana mestinya (Karya, 2023).

Kajian terhadap peran aktor dalam pembangunan Monumen Al-Qur'an di Alun-Alun Kajen dipandang perlu berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 1) Meski keberadaan Taman alun-alun Kajen dibutuhkan masyarakat untuk sarana rekreasi, namun ini bukanlah kebutuhan primer. Pembangunannyapun tidak menyelesaikan masalah lain yang lebih mendasar seperti permasalahan kumuh, gizi buruk, dan pengangguran.

Bukankah keberhasilan kebijakan dinilai dari segi kebermanfaatannya, demikian juga dengan keberadaan Monumen Al-Qur'an di Alun-Alun KAJEN apakah dapat dinikmati dan bermanfaat bagi seluruh warga kabupaten pekalongan?, 2) Tidak konsistennya pemerintah kabupaten pekalongan dalam menjalankan program pemerataan pembangunan dalam lingkup tata ruang. 3) adanya berbagai masalah lain yang belum diselesaikan oleh Pemkab Pekalongan seperti penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Wonokerto serta kegagalan penanganan air limbah akibat industri batik di kecamatan Buaran yang menyebabkan adanya pencemaran air di lingkungan kabupaten pekalongan.

Penting untuk diketahui bersama bahwa citra suatu daerah ditentukan oleh bagaimana daerah tersebut dibentuk oleh para pemimpinnya. Hal ini dapat dilihat melalui kemana arah pemerintah dari semua keputusan dan tindakan yang diambilnya (Paramita et al., 2017). Selain itu, nilai-nilai aktor yang terlibat pada formulasi kebijakan juga berpengaruh terhadap topik mana yang dikedepankan. Jika dilihat dari yang ada, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui kebijakan yang dikembangkannya memilih memperbaiki penataan ruang di sekitar Alun-Alun KAJEN untuk menciptakan pusat keramaian. Hal ini didasari karena meskipun kecamatan KAJEN dikenal sebagai pusat pemerintahan kabupaten pekalongan namun tingkat mobilitasnya masih terkalahkan oleh keramaian yang ada di kecamatan Kedungwuni, Buaran dan Wiradesa.

Pembangunan Monumen ini tentunya sangat erat kaitannya dengan peran dan nilai-nilai pemerintah Kabupaten Pekalongan yang mempunyai visi mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Pembangunan ini dianggap mampu meningkatkan mobilitas daerah kajan serta mampu dimanfaatkan oleh para UMKM sekaligus cara untuk menertibkan keberadaan PKL khususnya pedagang di sekitar Kecamatan Kajan karena dengan adanya Icon Monumen Al-Qur'an yang dapat menarik wisatawan (Agus, 2022).

Pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat dikatakan mempunyai peranan yang penting pada proses penetapan agenda dan memutuskan permasalahan mana yang nantinya akan diagendakan. Meskipun tentu akan ada proses negosiasi secara alamiah yang terjadi pada saat proses pengambilan keputusan, namun keputusan akhir tetap ada di tangan pengambil kebijakan. Pembangunan Monumen ini tentu merujuk pada visi Kabupaten Pekalongan yang tertera di RPJMD periode 2021-2026 bahwasanya Pemkab menginginkan adanya pemerataan pembangunan di wilayah kabupaten Pekalongan (RPJMD Kabupaten Pekalongan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa fokus pemerintah kabupaten adalah menyusun atau menata tata ruang seluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan sekitar. Hal ini sebenarnya cukup dilematis karena Kabupaten Pekalongan masih memiliki banyak persoalan lingkungan hidup yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah kabupaten. Tetapi dari berbagai

pemberitaan media yang ada menunjukkan bahwa perhatian Pemkab Pekalongan terfokuskan pada pembangunan ruang publik seperti revitalisasi pasar, Pengadaan IPAL, dan pembangunan tanggul namun secara media pembangunan Monumen Al-Qur'an di taman Alun-Alun KAJEN lebih mendapatkan sorotan.

Kajian yang dilakukan Yulieth-Rafael menunjukkan fakta bahwa penetapan agenda untuk tetap melanjutkan revitalisasi pasar KAJEN telah menyebabkan hadirnya masalah baru diantaranya adalah ketidak efektifan aktivitas jual beli di pasar KAJEN karena proses pembangunannya yang lebih lambat satu tahun dari sebelumnya (Yulieth-Rafael, 2020). Selain itu terdapat pula kajian penelitian mengenai pelaksanaan atas peraturan pengelolaan air limbah pada industri batik di Samorejo Pekalongan menunjukkan fakta bahwasanya masih terdapat berbagai permasalahan atas penerapan kebijakan yang ada. Diantaranya adalah pembinaan dan pengawasan oleh Perkim Kabupaten dan Dinas LH yang dinilai kurang. Pihak terkait tidak mampu memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran kebijakan yang ada, dan adanya ketidak konsistennya komunikasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan industri batik (Haniza et al., 2022). Sedangkan pada penelitian mengenai Perencanaan tata ruang di Kecamatan Buaran yang berfokus pada pembangunan infrastruktur berkelanjutanpun juga menghadapi tantangan. Bahwasanya dalam pembangunan infrastruktur di Simbang Kulon berjalan paralel dengan industri batik sehingga menciptakan kondisi perumahan yang tidak sejalan

dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh industri batik yang berdampak terhadap lingkungan dan tata ruang wilayah Kabupaten Pekalongan melalui terbentuknya kawasan kumuh (Zakaria et al., 2023).

Meski media berita yang ada mengabarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan berhasil mendapatkan penghargaan atas keberhasilan program pembangunan daerah di Musrembang Jawa Tengah pada tahun 2023 (Prokompin, 2022). Namun, dibalik kesuksesannya, masih ada sejumlah masalah yang luput dari perhatian. Selain itu masih cacatnya program pembangunan di bidang infrastruktur seperti yang telah dijelaskan diatas serta sebenarnya masih ada permasalahan lain yang harusnya segera diselesaikan oleh Pemkab dimana diantaranya adalah masalah pada bidang kesehatan.

Menurut fakta informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2022 terdapat 996 kasus stunting dan 51 kasus gizi buruk pada tahun 2022 dibandingkan tahun lalu yang hanya 36 kasus (Pekalongan, 2022). Selain itu, terdapat pula permasalahan lain seperti munculnya permukiman kumuh di beberapa wilayah Pekalongan. Berdasarkan data, luas permukiman kumuh di Kabupaten Pekalongan mencapai 344,21 hektare. Sebagian besar permukiman kumuh sebesar ini terletak di wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan. Diantaranya adalah wonokerto, tirta dan Siwalan. (Ahmad, 2023). Terbentuknya permukiman kumuh ini disebabkan karena rumah-rumah mereka terendam sehingga

masyarakat terpaksa membangun rumah di sepanjang aliran sungai. Hal ini menyebabkan munculnya permukiman kumuh dan berdampak pada ketidaksesuaian struktur tata ruang permukiman di Kabupaten Pekalongan. Tentu saja hal ini bertentangan dengan visi pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menginginkan penataan ruang dan pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Pekalongan.

Seluruh persoalan diatas seolah teralihkan oleh agenda pembangunan Monumen al-Quran. Hal ini menjadi bukti bahwa aktor-aktor berpengaruh telah memainkan peranannya dalam proses penetapan agenda, sehingga meskipun jelas masih ada permasalahan yang harus diselesaikan di bidang lain, pembangunan terus berlanjut. Selain perannya yang besar dan dominan, kita juga bisa melihat bahwa arah pemerintah Kabupaten Pekalongan yang lebih memperhatikan permasalahan pembangunan infrastruktur fisik daripada yang lainnya.

Lalu apa sebenarnya tujuan dibangunnya Monumen ini? Meski keberadaannya tidak bisa langsung dilihat atau dimanfaatkan warga dan bukan merupakan kebutuhan primer, namun pemerintah tetap melanjutkan proses pembangunannya. Kritik terhadap proses pembangunan Monumen diminimalkan, bahkan masyarakat pun tampaknya tidak terlalu sadar akan upaya pemerintah. Hal ini menarik untuk diteliti mengenai posisi dukungan masyarakat terhadap pembangunan Monumen, bagaimana proses perumusan kebijakannya serta sebenarnya siapa aktor yang terlibat pada tahap *agenda setting* sehingga pembangunan Monumen Al-Qur'an

terus ada dan akhirnya mampu menciptakan pemahaman yang positif bagi warga kabupaten pekalongan dan melupakan permasalahan disektor lain.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran aktor yang terlibat pada proses perumusan pembangunan Monumen Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana proses perumusan pembangunan Monumen Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan?
3. Bagaimana tujuan dari pembangunan Monumen Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Mengetahui peran aktor yang terlibat dalam proses perumusan pembangunan Monumen Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan
  - b. Mengetahui proses perumusan pembangunan Monumen Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan
  - c. Mengetahui tujuan dari pembangunan Monumen Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan

### 2. Manfaat

Berikut beberapa manfaat dari adanya penelitian ini :

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sekaligus dapat menjadi bahan acuan untuk peneliti berikutnya serta bisa menjadi bahan perbandingan proses perumusan kebijakan publik pada suatu daerah.

b. Manfaat praktis

i. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan terhadap disiplin ilmu yang telah dipelajari sebelumnya terutama pada mata kuliah ekonomi pembangunan.

ii. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat untuk mahasiswa/mahasiswi khususnya bagi mereka yang berkonsentrasi ekonomi pembangunan karena memberikan informasi mengenai proses perumusan kebijakan publik sekaligus keterlibatan aktor dalam prosesnya.

iii. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat untuk masyarakat umum khususnya generasi muda karena memberikan informasi mengenai proses perumusan kebijakan publik sekaligus keterlibatan aktor dalam proses

perumusannya sehingga dapat dijadikan sebagai motivasi untuk berperan aktif dalam membangun sebuah wilayah.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kajian, serta sistematika pembahasan.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memberikan gambaran tentang pengertian kebijakan publik, proses perumusan kebijakan publik, dan teori yang digunakan pada tahap perumusan kebijakan publik. Selain itu, terdapat pula tinjauan pustaka oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan bagi

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi gambaran umum mengenai proses penelitian yang dilakukan. Bab ini membahas berbagai topik seperti jenis, pendekatan, setting, subjek, sampel dari penelitian yang dilakukan serta terdapat pula gambaran mengenai kejelasan dari sumber data, teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan metode analisis data

##### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang dilakukan. Seluruh pembahasan dirinci dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

## BAB V PENUTUP

Bab ini memberikan informasi mengenai kesimpulan dari temuan penelitian. Tahap ini merupakan tahap akhir dari keseluruhan proses dan juga merupakan tempat masuknya saran dan rekomendasi dari para peneliti, yang kemungkinan besar dapat digunakan sebagai masukan, dan juga mempertimbangkan keterbatasan serta kelemahan penelitian yang dilakukan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Konsep Dasar Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah kekuasaan pemerintah untuk menjalankan wewenangnya terhadap masyarakat umum. Secara teori kebijakan pemerintah berjalan berdasarkan orientasi kepentingan umum guna mengatur kehidupan masyarakat (Mustari, 2015). Kebijakan ini biasa diartikan dengan suatu prinsip atau tindakan yang dipilih untuk mengatur dalam pengambilan keputusan. Pada tahap perumusannya, harus diawali dengan penetapan permasalahan yang dinilai paling urgent kemudian implementasinya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Menurut Wiliam Dunn, Analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan dengan metode penelitian dan argumen guna mendapatkan informasi nyata yang sesuai dengan keadaan untuk digunakan sebagai alat memecahkan permasalahan kebijakan. Sedangkan Kebijakan publik yakni ketetapan kolektif yang diambil oleh lembaga atau pejabat pemerintah melalui pertimbangan dari berbagai kompleksnya permasalahan yang ada untuk menghasilkan keputusan bukan sebuah tindakan (W N Dunn, 2000).

Sedangkan menurut Budi Winarno, kebijakan publik merupakan pengambilan keputusan yang melalui beberapa tahapan diantaranya

perumusan masalah, implementasi dan evaluasi kebijakan. Sedangkan analisis kebijakan merupakan penjelasan mengenai sebab akibat dari kebijakan publik (Winarno, 2007).

Sebuah kebijakan selalu berhubungan dengan sebuah keputusan. Makna dari keputusan itu sendiri adalah suatu sikap yang dipilih atas beberapa alternatif yang ada melalui tahapan analisis atas konsekuensi dari alternatif tersebut. Setiap keputusan yang ditetapkan akan menjadi pilihan terakhir dan keputusan ini biasanya dapat berupa sebuah tindakan ataupun opini. Hal ini terjadi karena masih terdapat kebimbangan dalam pengambilan keputusan. Maka dengan ini posisi alternatif yang diambil dapat dirasakan masuk akal atau tidak masuk akal dan dapat berdasarkan dugaan kuat atau dugaan lemah (Sore, 2017)

Tahap formulasi kebijakan adalah tahapan kritis dalam sebuah proses kebijakan. Hal ini disebabkan karena pada tahap inilah akan ada proses pemilihan solusi sebagai jalan keluar atas permasalahan oleh pembuat kebijakan. Seluruh aktor yang berperan akan mendiskusikan alternatif mana yang akan diambil dengan tetap memperhatikan besaran pengaruh yang dihasilkan. Proses ini biasanya disuguhkan dengan adanya diskusi dan tarik menarik antar aktor atas berbagai kepentingan sosial, politik dan ekonomi. Kebijakan publik yang dirancang oleh pejabat tentunya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan pada proses pembuatannya dilaksanakan melalui

beberapa proses di antaranya : Penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan evaluasi (Willim N Dunn, 2003)

Tabel 2. 1 Proses tahapan penyusunan kebijakan publik

TAHAPAN	CIRI
PENYUSUNAN AGENDA	Aktor terpilih memasukkan permasalahan ke dalam agenda publik. Banyak persoalan yang tidak terselesaikan dan ada pula yang tertunda untuk waktu yang tidak bisa ditentukan.
FORMULASI KEBIJAKAN	Pejabat merumuskan cara kerja alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut.
ADOPSI KEBIJAKAN	Alternatif kebijakan dipilih melalui bantuan dari legislatif, konsensus pimpinan institusi atau keputusan pengadilan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	Kebijakan atas alternatif yang telah dipilih kemudian dijalankan sebagaimana mestinya oleh unit administratif dengan penyesuaian keuangan dan sumber daya manusia.
PENILAIAN KEBIJAKAN	Satuan pengawas menentukan apakah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif telah berjalan sesuai dengan persyaratan yang ada di peraturan dalam merumuskan kebijakan dan mencapai tujuan.

## 2. Teori Elit-Massa

Para ahli yang ada telah mengemukakan berbagai model pengembangan kebijakan publik, termasuk jenis model teori elit-massa. Model elit-masa memandang pemerintah negara sebagai kelompok kecil yang mapan dan mereka berperan bukan sebagai pelayan rakyat. Teori elit memiliki arti bahwa institusi politik dan sosial dikendalikan oleh golongan penguasa yang memanipulasi sarana kekuasaannya demi keuntungan pribadi (Winarno, 2007).

Menurut Dye dan Zeigler kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pejabat elit yang memiliki kekuasaan besar. Padahal dengan kata “publik” yang ada seharusnya menjadi ciri bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil untuk kepentingan masyarakat umum, namun realita yang ada bukanlah yang seharusnya. Dye telah mengemukakan pendapatnya bahwa teori elit memiliki ciri dengan rakyat yang bersikap tidak peduli seta cenderung diam. Maka dengan ini, kaum elit justru menciptakan opini masyarakat luas mengenai kebijakan pribadinya bukan kebijakan yang seharusnya.

Kebijakan yang dikembangkan dengan model ini bersifat tumpul ke bawah yaitu dari elit ke masyarakat luas. Sehingga, kesimpulannya adalah kebijakan ini tidak diambil berdasarkan suara masyarakat. Berikut merupakan ciri dari model teori elit-masa menurut Thomas Dye dan Harmon Zeigler, dalam *The Irony Of Democracy* :

1. Masyarakat dibagi menjadi golongan kecil yang memiliki kekuasaan dan massa yang tidak memiliki kekuasaan.
2. Kelompok elit adalah mereka yang berasal dari kalangan masyarakat yang memiliki status ekonomi lebih tinggi.
3. Kebijakan publik yang diambil menggambarkan nilai-nilai elit penguasa, bukan tuntutan massa.
4. Elit mempunyai pengaruh langsung yang relatif kecil terhadap masyarakat yang acuh tak acuh, dan sebaliknya. Artinya, elite mempengaruhi massa yang lebih besar.

Model elit-massa berarti bahwa kebijakan publik mencerminkan suara para elit bukan suara masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa segala perubahan dan pembaharuan kebijakan terjadi secara perlahan dan dilaksanakan berdasarkan reinterpretasi nilai-nilai elite. Perubahan tersebut terjadi ketika terdapat fenomena yang dinilai membahayakan sistem politik, dan perubahannya dibuat hanya dilakukan untuk menjaga kelompok elit.

Kesejahteraan masyarakat dapat serta akan menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan oleh elit. Sebab elitisme bukan berarti kebijakan negara bertentangan dengan kesejahteraan rakyat, namun beban kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya telah berada di kuasa elite. Selain itu, elitisme menganggap masyarakat pada dasarnya pasif, acuh tak acuh, serta kurang awas

terhadap fakta mengenai kebijakan publik. Hal ini berdampak pada sulitnya masyarakat untuk mengawasi gerakan kelompok elit dalam melakukan pengambilan keputusan dan hanya dapat mempengaruhi tindakan mereka secara tidak langsung.

### 3. Pembangunan Perspektif Islam

Kesejahteraan, pertumbuhan, dan perkembangan per-ekonomian adalah tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi dinegara-negara berkembang tersebut pada saat ini mengalami banyak kegagalan. Dalam perspektif ide atau gagasan, ternyata pembangunan yang dilaksanakan banyak mengadopsi paham kapitalisme (Chapra, 2000). Oleh karena itu negara-negara ini mulai berhati-hati untuk tidak melakukan sepenuhnya ide yang muncul dari sistem kapitalisme ini.

Ditengah kegagalan pembangunan yang berlandaskan pada sistem kapitalisme dunia ini muncullah sebuah alternatif sistem ekonomi yang berbasiskan pada nilai-nilai ajaran syari'ah islam. Pada saat krisis ekonomi moneter melanda dunia, lembaga-lembaga ekonomi dinegara-negara berkembang yang menerapkan mekanisme syari'ah terbukti dapat bertahan dan bahkan disebagiannya mampu untuk dapat tumbuh dan berkembang (Hamidi, 2003).

Dalam teori-teori ekonomi, nilai-nilai yang ditawarkan ekonomi Islam tergolong hal yang baru. Meskipun pada kenyataannya ajaran Islam memberikan petunjuk-petunjuknya dalam beraktivitas ekonomi

tetapi secara bangunan ilmu masih membutuhkan proses untuk menjadi mapan. Termasuk dalam hal ini adalah cabang-cabang dari ilmu ekonomi sendiri, yang pada perkembangan berikutnya juga muncul sebagai alternatif dan menjadi bagian dari ekonomi Islam. Muncul dan berkembangnya ilmu ekonomi Islam ini turut memberikan alternatif pemecahan masalah yang berlarut-larut akibat dari mengusung gagasan kapitalisme yang mengalami kegagalan. Disisi lain ajaran syari'ah Islam memang menuntut para pemeluknya untuk berlaku secara professional yang dalam prosesnya menampilkan kerapian, kebenaran, ketertiban, dan keteraturan (Hafidhuddin & Tanjung, 2003).

## **B. Telaah Pustaka**

Berikut beberapa penelitian yang dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian ini, yaitu antara lain: Pertama, penelitian mengenai keterlibatan aktor pada proses penyusunan kebijakan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen, Semarang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak yang berpartisipasi pada proses formulasi kebijakan ini terdiri dari aktor primer (lurah/kader dan perangkatnya) dan aktor sekunder (masyarakat) (Husnul Yakin, Susi Sulandari, 2013).

Kedua, penelitian mengenai keterlibatan aktor pada tahap *setting agenda* terhadap lahirnya kebijakan perluasan wilayah kecamatan di kabupaten Maluku Tengah. Hasil penelitiannya menemukan kesimpulan bahwasanya pihak yang berperan pada proses penyusunan kebijakan ini

terbagi atas dua unsur, yaitu aktor formal (Pemda dan DPRD) dan non formal (Partai Politik, Masyarakat, Pemuda, Tokoh Agama). Seluruh aktor ini memiliki suatu pola hubungan interaksi yang dilakukan oleh antar aktor untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan (Salaputa et al., 2013).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ferina Ika Anjarwati mengenai keterlibatan aktor pada tahap penetapan agenda peumusan kebijakn atas pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kabupaten Banyumas, Jateng. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada proses penetapan agenda di perumusan kebijakan ini telah berjalan sebagaimana mestinya. Seluruh aktor telah berperan sesuai dengan tupoksinya meskipun telah terdapat kekurangan seperti tidak adanya peran aktor yang berasal dari luar pemerintahan (Anjarwati, 2013).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Udik Budi Wibowo mengenai keterlibatan aktor dan kekuatan politik terhadap lahirnya kebijakan sertifikasi. Penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa lahirnya kebijakan ini adalah suatu proses politis yang dibuat oleh pemangku kebijakan yang dimana dalam proses perumusannya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu pada tahap proses perumusannya telah menunjukan bahwa aktor yang terlibat pada proses perumusan lebih didominasi oleh peranan pemerintah (Wibowo, 2015).

Kelima, penelitian mengenai analisis keterlibatan dan kekuasaan aktor dalam proses perumusan kebijakan pembebasan lahan kawasan di Lombok. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan ini ada atas hasil

kerjasama politik antara Pemda dengan PT.LTDC dengan kekuatan modal pribadinya tanpa melibatkan masyarakat. Kuatnya jalinan interaksi pemerintah dengan investor dapat mereduksi keberadaan masyarakat sebagai salah satu aktor perumusan kebijakan dan berdampak pada status kebijakan yang terkesan tidak terlegitimasi (Winengan, 2016).

Keenam, penelitian mengenai fenomena keterlibatan aktor dalam proses perumusan kebijakan ex-officio Kota Batam dan peranan dari masing-masing aktor yang ada. Peneliti telah menemukan hasil bahwa aktor yang ikut berperan adalah Walikota Batam, Badan Pengusahaan Batam sebagai aktor utama dan Kadin Batam serta Media Massa berperan sebagai aktor sekunder (Paramita et al., 2017).

Ketujuh, penelitian yang menjelaskan mengenai peran aktor pada proses perumusan kebijakan Semarang Smart City dimana hasil temuan dari penelitian ini adalah telah terdapat 28 aktor yang terlibat. Seluruh aktor ini terbagi atas tiga unsur diantaranya adalah unsur masyarakat, swasta dan negara. Namun dari banyaknya aktor tersebut tidak ada satupun unsur masyarakat yang terlibat didalamnya. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perumusan kebijakan ini lebih didominasi oleh peranan Negara dan swasta (Fauzi & Rostyaningsih, 2018).

Kedelapan, penelitian mengenai peran *Civil Society Organization* pada proses formulasi kebijakan publik di Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemkab Ponorogo telah mengajak

*Civil Society Organization* untuk ikut terlibat pada proses diskusi perumusan kebijakan guna mempertahankan unsur transparansi sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintah yang baik (Mahardhani et al., 2020).

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Nahariah dan Nursaifullah mengenai fenomena keterlibatan anggota DPRD pada tahap penyusunan kebijakan di wilayah Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian menyatakan bahwa Peran dari anggota DPRD Kabupaten Sinjai pada tahap perumusan kebijakan ini disesuaikan dengan banyaknya Raperda yang akan dibahas dan keterlibatannya berperan sebagai panitia khusus di setiap Raperda yang berbeda-beda. Seluruh anggota dewan yang ikut berperan pada tahap ini harus memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah materi pokok, filosofis dan dampak sosial dari kebijakan yang sedang dirancang tersebut (Nahariah & Nursaifullah, 2021).

Kesepuluh, penelitian mengenai keterlibatan aktor pada proses penyusunan kebijakan Program Sekolah rawat Daerah Aliran Sungai Banyuwangi dengan judul “Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Pogram. Penelitian ini menunjukkan bahwa pihak yang ikut berperan pada proses perumusan kebijakan tersebut terdiri dari dua unsur internal pemerintahan dan eskternal pemerintahan. Internal terdiri dari sepuluh lembaga pemerintahan yang berperan untuk melakukan sinkronisasi dan duabelas lembaga pemerintahan yang berperan sebagai eksekutor. Sedangkan eksternal pemerintahan terdiri dari Sembilan Perguruan Tinggi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa

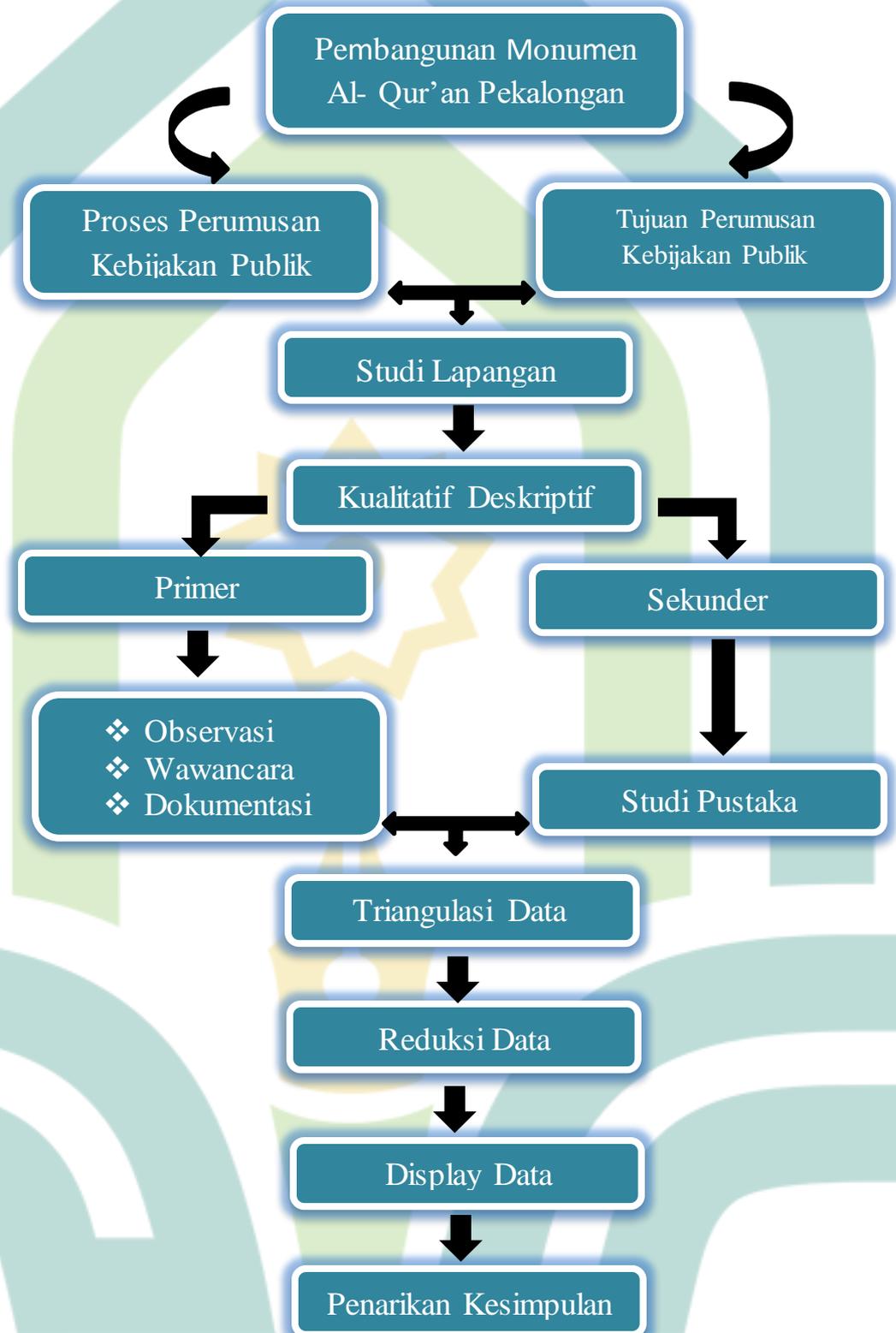
kebijakan yang lahir terkesan telah didominasi oleh aktor elit yang menyebabkan pihak swasta menjadi minim terlibat (Roshanti et al., 2022).

Persamaan dari seluruh penelitian di atas dengan yang penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang proses perumusan kebijakan publik dan aktor yang ikut berperan didalamnya, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek dan subjek penelitian.



### C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Penelitian ini terfokus pada penelitian Pembangunan Monument Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan untuk mengetahui keterlibatan aktor, proses perumusan serta tujuan dari pembangunannya. Jenis penelitian menggunakan kerangka studi lapangan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif. Data yang akan digunakan untuk menemukan hasil penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder didapatkan dari teknik study pustaka yang bersumber dari data kedinasan, kepustakaan, BPS dan lainnya yang digunakan untuk menyempurnakan data primer. Seluruh data yang didapatkan dilapangan akan diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi data kemudian dari data tersebut akan disusun dengan melalui metode analisis data yaitu reduksi data, display data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan. Secara makna penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari informasi atas peristiwa yang terjadi pada lingkungan alamiah (Mulyana, 2006). Sehingga untuk mempermudah penelitiannya maka data primer yang digunakan adalah data yang berasal langsung dari lapangan untuk menjaga orisinalitas data yang sesuai dengan peristiwa di lokasi penelitian. Maka dengan ini, peneliti akan melakukan penelitian lapangan dengan studi kasus pembangunan Monumen Al-Qur'an di Taman Alun-Alun Kajen Kabupaten Pekalongan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif-deskripsi yakni penelitian yang menjelaskan suatu objek, peristiwa, atau setting sosial yang nantinya akan dijelaskan dengan bentuk tulisan yang bersifat deskriptif (Anggito & Setiawan, 2018). Maka penelitian kali ini akan mencoba mengidentifikasi fenomena proses perumusan kebijakan pembangunan Monumen Al-Quran di Taman Alun-Alun Kajen. Untuk mempermudah peneliti dalam mendeskripsikan objeknya maka penelitian

kali ini akan membutuhkan informan yang berperan sebagai subjek penelitian.

### **C. Setting Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

### **D. Subjek Penelitian dan Sampel**

Subjek penelitian adalah pemerintah kabupaten pekalongan, masyarakat umum dan PKL di sekitar alun-alun Kajen.

### **E. Sumber Data**

#### 1) Data Primer

Merupakan data yang didapatkan peneliti dari seluruh informan penelitian, baik berupa perseorangan/kelompok (lembaga) yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utama . Data ini akan didapatkan dengan melakukan wawancara kepada seluruh narasumber yang berperan menjadi subjek penelitian. Berikut daftar narasumber pada penelitian ini :

1. Wakil DPRD Kab. Pekalongan
2. Asisten 2 Bupati Kabupaten Pekalongan Bidang Perekonomian dan Pembangunan
3. Kepala Bidang Ekonomi Insfrastruktur BAPPEDA LITBANG Kab. Pekalongan
4. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Pedagang bakso kuah di Alun-Alun Kajen

## 6. Pedagang kaki lima snack dan es di Alun-Alun Kajan

### 2) Data Sekunder

Adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh penulis melalui wawancara melainkan data ini sifatnya sudah ada sebelumnya sehingga peneliti hanya bertugas untuk mencari dan menyatukan data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data ini akan didapatkan oleh peneliti di tempat kumpulan informasi seperti perpustakaan kabupaten pekalongan, perkantoran, serta kedinasan guna menyempurnakan data primer yang sebelumnya.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1) Wawancara

Adalah teknik pencarian data melalui cara berdialog secara langsung serta bersifat in depth interview. Kegiatan ini adalah proses diskusi ringan yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian bersama dengan seluruh informan untuk mendapatkan informasi dan gambaran peristiwa sesuai dengan keadaan yang terjadi.

### 2) Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data berupa foto yang diambil melalui pemotretan. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data seperti arsip undangan, buku-buku, surat kabar, serta bukti lain yang masih berhubungan dengan penelitian ini sebagai bukti nyata atas peristiwa yang sedang diteliti. Alat yang dapat digunakan dalam hal ini adalah Smartphone atau kamera untuk mempermudah proses dokumentasi

yang dilakukan. Kemudian hasil dari dokumentasi ini dijadikan sebagai data sekunder untuk menyempurnakan data primer.

### **G. Teknis Keabsahan Data**

Penelitian ini menggunakan teknis triangulasi sebagai cara untuk menguji keabsahan data yang didapatkan. Jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi data. Maka dengan ini peneliti akan mendapatkan data dari kegiatan wawancara yang dilakukan pada berbagai sumber yang berbeda dimana nantinya akan digabungkan untuk mendapatkan gambaran fakta atas peristiwa yang sedang diteliti. Data ini berasal dari berbagai sumber yang berbeda termasuk data verbal seperti wawancara, diskusi, ataupun data visual seperti foto dan video. Hal ini sesuai dengan setting penelitian yang telah dibuat bahwasanya peneliti telah menentukan beberapa informan dimana pada pelaksanaannya akan diwawancarai dengan pertanyaan dan topik yang sama. Dari seluruh hasil wawancara dikorelasikan dengan data sekunder untuk menguji kevalidan sehingga ditemukan data yang nyata.

### **H. Metode Analisis Data**

Secara singkat tata cara analisa dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Reduksi Data, dari data yang didapatkan akan dilakukan pemilihan dan pemusatan perhatian yang disesuaikan dengan fenomena yang sedang dikaji. Seluruh data baik catatikan kasar, foto, arsip dan lain-lain akan dipilah sesuai dengan kebutuhan.

- 2) Pengujian Data, dari data yang didapatkan akan ditampilkan secara tertulis berdasarkan fakta aktual yang saling berhubungan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman atas peristiwa yang sebenarnya terjadi terhadap fenomena yang sedang diteliti.
- 3) Menarik Kesimpulan Verifikasi, dari seluruh data yang ada akan ditarik kesimpulan untuk memahami makna serta arti dari pola dan alur serta sebab akibat yang terjadi terhadap fenomena yang sedang diteliti.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis**

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada di daerah pantura bagian barat, memanjang ke arah selatan dengan Kecamatan Kajen sebagai ibu pusat pemerintahan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Pekalongan di utara, Kabupaten Batang di timur, Kabupaten Banjarnegara di selatan, serta Kabupaten Pemasang di barat.

Secara administrasi Kabupaten Pekalongan terdiri atas 19 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 272 desa dan 13 kelurahan dengan pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Kajen yang menggantikan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang dahulunya berlokasi di Jl. Nusantara Nomor 1 Kota Pekalongan. Perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan ke Kajen, dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2001, walaupun SK mendagri sudah diterbitkan pada tahun 1996. Hal ini terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas pemerintah di Kecamatan Kajen yang dilaksanakan secara bertahap.

## 2. Visi Misi Kabupaten Pekalongan

### a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan Yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong”

### b. Misi

- i. Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Nasionalis Religius.
- ii. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif.
- iii. Menyediakan infrastruktur publik yang merata.
- iv. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau.
- v. Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing.
- vi. Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat.
- vii. Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran.
- viii. Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat.
- ix. Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta menyediakan peluang pasar yang luas.

- x. Memperkokoh kerukunan hidup beragama, bergotong royong dan berbudi pekerti.
- xi. Mengembangkan potensi kepemudaan, seni budaya dan olahraga

### 3. Struktur Pemerintahan

Struktur Pemerintahan Kabupaten Pekalongan terdiri dari:

#### a. SEKRETARIAT DAERAH (SETDA), Terdiri Dari :

##### i. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- a) Bagian Tata Pemerintahan
- b) Bagian Kesejahteraan Rakyat
- c) Bagian Hukum

##### ii. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

- a) Bagian Perekonomian;
- b) Bagian Administrasi Pembangunan;
- c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

##### iii. Asisten Administrasi

- a) Bagian Umum;
- b) Bagian Organisasi;
- c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

#### b. STAF AHLI

- a) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b) Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
- c) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.

- c. SEKRETARIAT DPRD (*SETWAN*)
- d. INSPEKTORAT DAERAH
- e. DINAS DAERAH, terdiri dari :
  - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;(*DINDIKBUD*)
  - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (*DPU TARU*)
  - c) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup; (*DINAS PERKIM DAN LH*)
  - e) Dinas Kesehatan;(*DINKES*)
  - f) Dinas Sosial;(*DINSOS*)
  - g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;(*DINAS PMD*)
  - h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (*DINDUKCAPIL*)
  - i) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;(*DINPERINDAG*)
  - j) Dinas Kelautan Dan Perikanan;(*DINLUTKAN*)
  - k) Dinas Perhubungan;(*DINHUB*)
  - l) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;(*DKPP*)
  - m) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata; (*DINPORAPAR*)
  - n) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;(*DPMPTSP*)
  - o) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;(*DINAS ARPUS*)
  - p) Dinas Komunikasi dan Informatika;(*DINKOMINFO*)
  - q) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; (*SATPOL PP DAN DAMKAR*)

- r) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana; (**DINAS P3A DAN PPKB**)
- s) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja; (**DINKOPUKMDAN NAKER**)
- f. BADAN DAERAH, terdiri dari :
  - a) Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia; (**BKPSDM**)
  - b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan; (**BAPPEDA LITBANG**)
  - c) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; (**BPKD**)
  - d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (**BAKESBANGPOL**)
- 4. Gambaran Umum Kawasan Alun-alun Kabupaten Pekalongan

Pada awal tahun 2024, pemerintah kabupaten pekalongan melakukan peresmian atas penataan kawasan alun-alun kajen dengan dipimpin langsung oleh Ibu Bupati Fadia Arafiq beserta Asisten dan Staff Ahli Bupati, Para Kepala OPD, Direktur RSUD Kajen, Kesesi, dan Kraton, Para Kepala Bagian di Kantor Setda Kabupaten Pekalongan, Para Camat dari 19 Kecamatan, Pimpinan Cabang Bank Jateng, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pekalongan, serta masyarakat yang turut hadir di Kawasan Alun-Alun Kajen.

Penataan kawasan alun-aun ini dimulai sejak tahun 2022 dimana pelaksanaannya melalui beberapa tahapan. Penataan tahap pertama (Tahun 2022) mencakup pekerjaan seperti drainase lapangan, pedestrian Selatan, gapura, Monumen Al-Quran, dan air mancur dengan total anggaran yang telah digunakan adalah sebesar 6,8 miliar. Pembangunan tahap I ini merupakan bagian inti dari program penataan kawasan alun-alun sehingga pembangunan inilah yang terlebih dahulu diselesaikan. Sedangkan penataan tahap 2 dilaksanakan pada tahun 2023 yang mencakup pembangunan akses taman bunga, grassblock, playground, taman bunga, lapangan futsal, dan tower air beserta jaringannya dengan total anggaran sebesar 4 miliar. Seluruh penggunaan dana ini bersumber dari anggaran APBD tahun 2022 dan 2023 dengan luas penataan kawasan sekitar 4,7 hektar.

Sesuai dengan pernyataan Bapak Hasbi selaku pegawai Dinas DPU Taru, kini semenjak peresmian yang telah dilakukan oleh Pemkab, posisi kawasan alun-alun masih pada tahap pemeliharaan hingga tanggal 4 Desember 2024. Sehingga dengan demikian seluruh masyarakat yang berkunjung bahkan pedagang kaki lima yang berada disekitar kawasan diharuskan untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan ketertiban untuk pemeliharaan.

## B. Data Lapangan

Penetapan agenda pembangunan Monumen Al-Quran merupakan bagian dari pelaksanaan program penataan kawasan alun-alun Kabupaten Pekalongan dimana program ini memiliki ciri sebagai berikut :

### 1. Kebijakan publik lahir bukan dari tuntutan massa

Berikut hasil wawancara dari beberapa informan yang telah dipilih peneliti yaitu sebagai berikut :

Jawaban dari Informan Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan:

“Pada saat rapat penetapan agenda ini dipimpin langsung oleh Ibu Bupati dan beliau juga yang memberikan ide akan pembangunan ini. Seingat saya saat rapat tidak ada Perangkat Daerah yang menyanggah akan ide tersebut. Karena pada saat itu kita semua sepakat bahwa Kabupaten Pekalongan harus memiliki Icon ciri khas” (Hariyanto, 2024).

Adapun jawaban Informan Asisten 2 Bupati Pekalongan Bidang Perekonomian dan Pembangunan :

“Untuk proses penetapan program ini diawali dengan ide gagasan yang muncul dari Ibu Bupati Pekalongan masa jabatan 2020-2026. Beliau menginginkan kabupaten pekalongan harus ada icon yang menjadi ciri khas dari wilayah ini. Maka kami mengadakan rapat Internal Setda dan Bupati untuk menentukan perangkat daerah yang akan terlibat diantaranya adalah DPU TARU, LH, Kementrian Agama, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Perhubungan dan tentunya ada badan BAPPEDA LITBANG juga” (Kuncoro, 2024).

Adapun jawaban Informan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

“Pembangunan Monumen Al-Qur’an adalah ide yang diberikan langsung oleh Ibu. Pada rapat kala itu ada banyak perangkat daerah yang diajak diskus dan kami adalah Badan yang ditugaskan sebagai penanggung jawab atas pembangunan terutama yang berhubungan dengan teknis dilapangannya” (Asidiq, 2024)

Sedangkan jawaban informan dari unsur non-pemerintah sebagai berikut :

“Saya sudah berjualan disini hampir tujuh tahun lebih. Tapi saya tidak pernah diajak dalam proses diskusi-diskusi pemerintahan. Saya kira itu tugas mereka yang punya jabatan dan kalau misalnya saya diajak rapat ya saya tidak paham sama sekali mba sanah. Disini kami saya hanya merasa senang karena dengan adanya monumen sekarang disini ramai pengunjung” (Rini, 2024).

Adapun jawaban dari informan selanjutnya :

“Pedagang disini tidak mengetahui soal adanya rencana pembuatan al-quran itu mba, kami juga kaget. Tapi meskipun begitu saya tetap bersyukur karena dengan adanya orang-orang proyek itu bisa menambah jumlah pelanggan saya mba” (Arum, 2024).

## 2. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan

Berikut beberapa jawaban yang diberikan oleh infroman terkait dengan proses perumusan pembangunan Monumen Al-Qur’an di kawasan alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan yaitu sebagai berikut :

Jawaban dari infroman Bapak Wahyu Kuncoro :

“Rapat perdana dilakukan pada bulan juli tahun 2021. Alur proses perumusan kebijakan sudah kami lakukan sebagaimana seharusnya dengan diawali pembuatan Masterpane Pembangunan kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan DED serta didiskusikan lebih lanjut dalam rapat FGD bersama seluruh perangkat daerah dan pihak terkait” (Kuncoro, 2024)

Adapun jawaban dari informan Bapak Widi Haryanto:

“Hal yang menjadi bahan pertimbangan saat proses penetapan agenda ini adalah program pemerataan pembangunan yang tertuang di RPJMD 2020-2026 yang dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian diseluruh wilayah kabupaten. Penataan kawasan alun-alun ini adalah langkah awal yang akan meningkatkan mobilitas di wilayah kabupaten khususnya sisi selatan dan dengan ini maka akan berdampak pada sisi perekonomian yang salah satunya adalah pendapatan pedagang kaki lima disekitar lokasi. Yang perlu saya sampaikan bahwa dari setiap pembanguana yang dilakukan oleh pemerintah selalu ada hubungannya dengan perekonomian sebagai usaha kami untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat semua” (Haryanto, 2024).

Adapun jawaban informan Bapak Hasbi Asidiq :

“Ini adalah program besar karen berkaitan dengan Icon wilayah kita yang tentunya akan berdampak ke banyak sektor. Sehingga kemarin kami melakukan rapat penetapan program ini cukup lama sekitar hampir 3-4 bulan dimana setiap bulannya minimal 2-3 kali pertemuan. Setiap rapat, seluruh perangkat daerah harus memandang dari sisi tugas dan kewajibannya masing-masing. Sebagai contoh saya di DPU taru maka saya dan kawan-kawanlah yang memikirkan teknisnya” (Asidiq, 2024).

Sedangkan berikut jawaban dari Informan dari unsur Non-Pemerintahan :

“Awalnya saya kaget mengapa dialun-alun dibangun seperti sekarang. Seingat saya proses pembangunnya berjalan dari 2 tahun lalu mba dan semenjak saat itu pula disini menjadi tidak banyak acara besar karen lapangan di dalam semakin sempit padahal dulu disini hampir setahun duakali selalu ada acara konser-konser gitu. Tapi meskipun demikian, kami dari PKL tidak ada yang mau komplek atas pembangunan ini karena ya dengan kami tetap bisa dan diperbolehkan untu tetap berdagang disekitar sini saja itu sudah cukup mba sanah”(Rini, 2024).

Adapun jawaban infoman selanjutnya :

“Seingat saya lapangan disini mulai ditutup *pager* proyek itu dari bulan juli 2022. Saat proses pembangunan itu alhamdulillah kami pedagang disini tidak diusir namun ada beberapa yang dibagian depan sana memang tidak boleh digunakan dagang untuk sementara. Sebenarnya pemerintah mahu bangun apa saja terserah yang penting kami yang mencari nafkah disini jangan diusir”(Arum, 2024).

### 3. Kebijakan Publik menggambarkan nilai elit

Berikut hasil wawancara dari beberapa Unit Perangkat Daerah terkait dengan tujuan dari pembangunan monumen al-qur'an kabupaten pekalongan :

Jawaban dari informan Bapak Widi Haryanto:

“Saat rapat dalam penetapan agenda, bahwa pembangunan monumen Al-Qur'an di kawasan alun-alun Kajen ini telah kami sepakati bersama dengan perangkat daerah yang lain bahwa ini adalah sebagai cara kami selaku pemangku kebijakan untuk menciptakan icon sebagai ciri khas kabupaten pekalongan yang dikenal sebagai kota santri sebagai langkah awal untuk pemerataan pembangunan untuk percepatan pertumbuhan perekonomian wilayah” (Haryanto, 2024).

Adapun jawaban informan Bapak Wahyu Kuncoro :

“Kami para pemangku kebijakan sebenarnya mempunyai hak untuk membuat program kerja apapun untuk masyarakatnya dan penataan kawasan alun-alun ini merupakan program yang telah kami sepakati dari tahun 2021. Pembangunan monumen al-quran yang sempat dinilai tidak penting dan terkesan menghambur-hamburkan dana APBD ini sebenarnya menurut kami ini adalah program yang bagus dengan jangka panjang yang sangat menjamin. Hal ini disebabkan tujuan dari pembangunan monumen ini adalah menciptakan icon kabupaten pekalongan yang darisinitilah nantinya akan berdampak ke banyak sektor mulai dari pariwisata, pedagang kaki lima, pendapatan masyarakat, tingkat mobilitas dan sebagainya” (Kuncoro, 2024)

Adapun jawaban informan Bapak M. Hasbi Asidiq :

“Kabupaten Pekalongan sangat membutuhkan daya tarik wilayah agar daerah kita ini mudah dikenal dimasyarakat luas seperti halnya mba sanah menyebut semarang dengan kota tuanya, purwokerto dengan menara menyalanya begitupun kabupaten pekalongan yang ingin dikenal dengan monumen al-qur'annya” (Asidiq, 2024).

Ketiga informan diatas adalah para pemangku kebijakan yang telah menetapkan program pembangunan monumen al-quran dengan tujuan sebagaimana informan sampaikan seperti diatas. Namun ketika peneliti melanjutkan wawancara dengan unsur non-pemerintah sebagai unsur yang terkena dampak atas adanya pembangunan menjawab sebagai berikut :

Jawaban dari Informan Pedagang Kaki Lima Ibu Rini :

“Saya tidak tahu mengapa pemerintah membangun al-quran ditengah-tengah lapangan sini namun semenjak adanya bangunan yang mirip al-quran tersebut banyak pengunjung yang berdatangan untuk mengunjungi alun-alun” (Rini, 2024).

Jawaban dari Informan selanjutnya :

“Yang saya rasakan, sekarang sudah banyak masyarakat yang berdagang disini tidak seperti dahulu yang sangat sepi. Mereka dari wiradesa, kedungwuni, bojong banyak yang membuka usahanya disini. Ya saya jadi banyak saingannya tapi meskipun demikian alhamdulillah pendapatan tiap harinya tetap bisa untuk mencukupi kehidupan keluarga kami”(Arum, 2024).

### **C. Aktor Dalam Proses Perumusan Pembangunan Monumen Al-Qur'an**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa hadirnya gagasan pembangunan monumen al-qur'an lahir dari ide Bupati Fadia Arafiq yang kemudian dari hal itu menjadi tombak awal atas pelaksanaan pembangunan penataan kawasan alun-alun kajen. Pembangunan Icon Kabupaten yang telah menghabiskan miliaran dana APBD dilaksanakan dengan persiapan yang cukup panjang yaitu sekitar hampir satu tahun persiapan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan

oleh salah satu pihak perangkat daerah BAPPEDA LITBANG dimana bulan juli tahun 2021 sampai juli 2022 adalah waktu yang digunakan oleh pemerintah untuk mematangkan konsep yang dibuat.

Penetapan perangkat daerah yang terlibat hadir berdasarkan keputusan dari Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan dimana perangkat daerah yang terlibat dalam proses perumusan pembangunan monumen al-qur'an adalah sebegitu berikut :

1. Bupati

Posisi beliau yang menjadi nomor satu se kabupaten pekalongan sekaligus pemilik ide awal atas program ini menjadi peran penting dalam proses diskusi dan penetapan agenda yang dilakukan selama satu tahun persiapan berjalan.

2. Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

Pada proses perumusan kebijakan, instansi ini berperan dalam pembuatan rencana anggaran yang akan digunakan untuk merealisasikan pelaksanaan agenda pembangunan penataan kawasan alun-alun.

“Lembaga eksekutif yang ikut berperan dalam proses diskusi tentang agenda ini salah satunya tentu ada dari sekretariat daerah yang terfokus untuk menentukan RAB dari agenda ini” (Sumarrosul, 2024)

3. Asisten 2 Bupati Pekalongan Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Posisi beliau yang bertugas sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan kewajibannya menjadi sangat penting dalam penetapan agenda kebijakan. Pembangunan monumen al-quran yang memiliki tujuan jangka panjang sesuai dengan pernyataan dari Pak Wahyu selaku Asisten 2 Bupati adalah ke sektor percepatan perekonomian kabupaten maka program ini adalah tugas penuh beliau dalam menindaklanjuti ide yang diberikan oleh Ibu Bupati Pekalongan periode 2020-2026.

#### 4. BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan

Seluruh rencana pembangunan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif selalu melibatkan peran dari instansi BAPPEDA LITBANG.

“Tentu kami terlibat dalam proses perumusan program ini karena hal ini memang berhubungan dengan instansi kami mba sanah” (Haryanto, 2024).

BAPPEDA LITBANG adalah badan daerah yang memiliki peran untuk terlibat dalam membuat perencanaan atas pembangunan yang akan dilakukan oleh seluruh lembaga eksekutif. Hal ini pula yang terjadi dengan proses perumusan pembangunan monumen al-quran yang mulai dirancang dari tahun 2021. Peran atas program ini lebih ditugaskan kepada Bidang Ekonomi Infrastruktur BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan karena program ini berhubungan dengan perihal sektor perekonomian dan selama masa diskusi persiapan program ini diikuti langsung oleh Kepala Bidang yaitu Bapak Widi.

“Selama rapat berlangsung kami hanya berpedoman dengan RTRW serta RPJMD karena kedua hal itulah yang selalu menjadi patokan awal kami dalam mendiskusikan sebuah program atau kebijakan”

#### 5. DPRD Kabupaten Pekalongan

Saat penyusunan seluruh kebijakan publik, keterlibatan lembaga legislatif adalah suatu keharusan (Sumarrosul, 2024). Posisi DPRD memiliki hak untuk memberi izin atau tidaknya atas suatu agenda yang direncanakan oleh lembaga eksekutif. Namun hal yang paling menjadi tugas utama dari DPRD dalam menanggapi sebuah perumusan kebijakan publik ini adalah terkait dengan penggunaan dana APBD. Pihak legislatif mempertimbangkan dan mendiskusikan terkait RAB pembangunan penataan kawasan alun-alun karena seluruh RAB ini bersumber dari APBD.

#### 6. Dinas Penataan Umum dan Tata Ruang

Penetapan agenda pembangunan monumen al-qur'an dikawasan alun-alun berhubungan dengan penataan tata ruang publik sehingga program ini ditanggungjawabkan kepada dinas DPU TARU karena instansi inilah yang berhubungan langsung dengan teknis dilapangan.

“DPU TARU adalah dinas yang menjadi leading sektor dari adanya program pembangunan ini dan disanalah desain serta teknis pembangunan dirancang secara penuh bersama dengan konsultan yang telah dipilih” (Kuncoro, 2024).

#### 7. Dinas Perdagangan

Pemerintah kabupaten pekalongan periode 2020-2026 menyepakati program pembangunan monumen al-qur'an atas tujuan jangka panjang yang mengarah ke sektor ekonomi sehingga dinas perdagangan juga terlibat dalam proses diskusi kebijakan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Widi bahwa Pemkab sedang mengupayakan adanya pemerataan pembangunan untuk percepatan pertumbuhan perekonomian kabupaten pekalongan. Peran dari dinas ini terfokus dengan pembahasan atas penataan para pedagang yang telah ada dan yang nantinya akan ada sehingga tujuan akan program ini bisa dicapai.

“Desain pembangunan atas penataan kawasan alun-alun kajan selain tentang monumen al-qur'an nantinya juga akan dibangun pertokoan yang rapih layaknya d Kota Jogj karena mimpi kami adalah demikian” (Kuncoro, 2024).

#### 8. Dinas Koperasi dan UMKM

Keterlibatan instansi ini dalam proses perumusan adalah pembacaan keadaan lokasi yang terfokus dengan keberadaan UMKM. Sesuai pernyataan dari Bapak Wahyu bahwa pusat UMKM yang dibangun di Wonopringgo telah mati total sehingga pemerintah berencana untuk membangun pusat UMKM kembali namun berlokasi disekitar kawasan alun-alun. Maka dengan ini dinas koperasi dan UMKM menjadi perangkat daerah yang ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan.

#### 9. Dinas Perhubungan

Berdasarkan pernyataan dari Asisten 2 Bupati bahwa keterlibatan dinas perhubungan terhadap proses diskusi adalah terkait dengan pembacaan situasi yang terfokus pada lalu lintas dan kemacetan yang akan terjadi saat proses pembangunan maupun saat bangunan sudah ada. Kawasan alun-alun yang menjadi pusat keramaian dan berkumpulnya masyarakat telah menimbulkan kemacetan sehingga dalam proses diskusi terkait desain penataan alun-alun melibatkan DISHUB.

“Fungsi dari alun-alun sendiri memang untuk tempat berkumpulnya masyarakat. Dahulu mungkin masih sedikit yang berkumpul disini namun ketika program ini dijalankan prediksi kami kemacetan akan terjadi karena alun-alun telah memiliki daya tarik sehingga pasti banyak pengunjung yang datang dan bisa mba sanah lihat sendiri setiap weekend terkhusus minggu alun-alun padat pengunjung” (Kuncoro, 2024).

#### 10. Dinas Lingkungan Hidup

Salah satu hal yang menjadi diskusi panjang saat penetapan agenda ini adalah terkait dengan perubahan struktur lahan alun-alun yang dirubah menjadi lahan yang penuh bangunan bukan lahan hijau seperti dahulu. Selain itu menurut penuturan dari Bapak Wahyu peran dari LH juga mendiskusikan tentang sumber daya listrik, keberadaan taman, bahkan keadaan tanah dialun-alun juga menjadi titik fokus diskusi dari dinas lingkungan hidup.

#### 11. Dinas Pariwisata

Hadirnya program pembangunan monumen al-qu'an yang tujuannya adalah untuk menciptakan icon serta memunculkan daya tarik agar banyak pengunjung yang datang adalah hal yang sudah dipahami bersama oleh seluruh perangkat daerah yang terlibat (Bapak Hasbi). Sehingga dengan ini dalam pembuatan desain untuk pelaksanaan dilapangan diperlukan peran dari dinas pariwisata. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh perwakilan dari Dinas Penataan dan Tata Ruang yang mengatakan bahwa mereka membutuhkan diskusi sangat intens dengan Dinas LH dan Dinas Pariwisata guna memaksimalkan atas program yang sudah disepakati langsung bersama Bupati.

#### 12. Kementrian Agama Kabupaten Pekalongan

Pemilihan atas icon yang dibangun oleh pemerintah sesuai hasil diskusi adalah hal yang sejalan dengan ciri kabupaten pekalongan yang dikenal dengan sebutan kota santri. Sehingga dengan hal ini pembuatan desain atas bentuk al-qur'an, ayat yang akan ditampilkan serta ukiran dan ukuran dari bentuknya menjadi diskusi panjang bersama kementrian agama kabupaten Pekalongan.

“Kemarin saat pelaksanaan pembangunan sempat terjadi kesalahan penulisan ayat yang ditampilkan di monumen al-qu'an itu sehingga pihak yang berperan dan bertugas dalam hal ini adalah lembaga Kementrian Agama yang sang mengajak pihak MUI” (Haryanto, 2024).

Berdasarkan pamarapan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa aktor yang terlibat dalam proses perumusan

agenda pembangunan Monumen Al-Qu'an Kabupaten Pekalongan hanya bersumber dari unsur pemerintahan tanpa adanya campur tangan pihak swasta bahkan masyarakat. Pada hal ini pula dapat disimpulkan bahwa peran Bupati selaku pemimpin pada lingkup daerah sangat berpengaruh terhadap penetapan agenda publik dan hal ini pula yang terjadi di Kabupaten pekalongan. Layaknya seorang pemimpin, ketika Bupati menginginkan suatu hal maka para perangkat daerah dan Pegawai dibawahnya akan membantu dan mendukung keinginannya. Namun meskipun demikian, bukan berarti ide yang ada langsung *ditelan mentah-mentah*, karena berdasarkan rangkuman wawancara peneliti saat dilapangan dapat ditemukan fakta bahwa seluruh aktor yang terlibat dalam proses perumusan selalu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan posisinya masing-masing. Dan hal lain yang menarik dari penetapan agenda ini adalah kebijakan publik yang sifatnya hadir untuk rakyat ternyata dapat lahir dan hadir tanpa persetujuan dari pihak masyarakat.

#### **D. Proses Perumusan Pembangunan Monumen Al-Qur'an**

Pembangunan monumen al-qur'an yang menggunakan dana APBD secara penuh telah menjadi agenda besar bagi Pemkab Pekalongan pada tahun 2021. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap informan telah ditemukan hasil bahwa proses perumusan agenda ini hampir berjalan selama satu tahun penuh. Selama tahu tahun ini ada beberapa tahapan diskusi yang berjalan selama 2-3 kali disetiap bulannya mulai dari Juli

2021 hingga juli 2022 (Bapak Hasbi). Berikut tahapan proses perumusan kebijakan terhadap program pembangunan monumen al-qur'an dalam penataan kawasan alun-alun kajeen kabupaten pekalongan yang telah peneliti temukan :

#### 1. Penyusunan Agenda

Setelah Bu Fadia resmi menjadi Bupati Pekalongan periode 2020-2026 maka pemerintahan resmi menjadi milik beliau bersama seluruh perangkat daerah dibawahnya. Langkah awal yang dilakukan oleh jajaran pemkab adalah dengan langsung mengadakan rapat untuk membuat RPJMD. Produk inilah yang menjadi pegangan bagi Pemkab untuk menjalankan kewajibannya sebagai pemangku kebijakan (Haryanto, 2024). Penentuan visi, misi, langkah dan gambaran umum keadaan kabupaten pekalongan semuanya tertuang dalam RPJMD yang telah dirancang bersama.

Menindaklanjuti RPJMD tentang rencana pemerataan pembangunan infrastruktur publik, maka Setda mengundang beberapa perangkat daerah untuk membahas terkait rencana penataan kawasan alun-alun kabupaten pekalongan. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ibu Bupati dan beliau pula yang menjelaskan maksud atas ide yang disampaikan dimana bahwasannya menurut Bupati sudah saatnya Pemkab Pekalongan menata ulang kawasan alun-alun sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah di daerah lain. Hal ini disebabkan karena menurtnya Icon daerah adalah pembangunan yang akan

berdampak panjang pada peningkatan perekonomian dari banyak sektor (Haryanto, 2024). Atas persetujuan dari seluruh aktor yang hadir dalam diskusi maka permasalahan ini menjadi prioritas yang kemudian dimasukkan ke agenda publik pada periode 2020-2026.

## 2. Formulasi Kebijakan

Setelah ide yang disampaikan oleh Bupati diterima dan dimasukkan ke agenda publik maka langkah selanjutnya adalah terkait pembuatan Perda. Pembuatan produk ini ditugaskan kepada badan daerah BAPPEDA LITBANG Kabupaten pekalongan. Selain itu hal yang dilakukan oleh lembaga eksekutif adalah dengan membuat *Feasible Study (FS)*, *Detail Engineering Desain (DED)*, desain 3D serta RAB. Kemudian seluruh dokumen tersebut hasilnya didiskusikan ulang dengan pihak Bupati yang kemudian dipresentasikan dengan pihak DPRD untuk mendapatkan masukan dan keputusan atas rencana pembangunan yang telah dibuat oleh lembaga eksekutif (Sumarrosul, 2024).

## 3. Adopsi Kebijakan

Setelah pihak aktor dari eksekutif selesai menyiapkan seluruh dokumen atas agenda penataan kawasan alun-alun. Kemudian data yang ada dipresentasikan dan didiskusikan dengan pihak DPRD kabupaten pekalongan.

“Saat diskusi pertama, kami sempat menolak dan mengkritisi atas penyusunan agenda ini. Karena menurut kami disituasi seperti ini, Pemkab belum waktunya untuk mempercantik

kawasan alun-alun. Ada hal lain yang lebih penting seperti jalan yang rusak misalnya” (Sumarrosul, 2024).

Proses diskusi perumusan kebijakan hingga mencapai keputusan pengadilan untuk pemberian izin dalam melaksanakan agenda ini hampir berjalan selama satu bulan. Beberapa hal yang menjadi keputusan dalam proses diskusi ini adalah penataan kawasan alun-alun dibagi menjadi 4 tahap. Hal ini disesuaikan dengan ketersediaan APBD di kabupaten pekalongan. Pelaksanaan atas 4 tahap ini disesuaikan dengan skala prioritas dimana pembangunan tahap pertama adalah pembangunan monumen al-qur'an, kedua taman alun-alun, ketiga penataan trotoar sekitar alun-alun dan keempat adalah penataan PKL (Sumarrosul, 2024).

#### 4. Implementasi Kebijakan

Setelah agenda disepakati oleh pihak DPRD Kabupaten pekalongan. Kemudian untuk pelaksanaan dilapangannya dipegang penuh oleh DPU TARU dan Dinas Lingkungan Hidup. Pemilihan kedua instansi ini sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing. DPU TARU berperan untuk melakukan pengawalan serta pengawasan pekerjaan yang dilakukan saat pembangunan dan Dinas LH terfokus pada perannya untuk melakukan penjagaan atas keberadaan taman disekitar alun-alun kabupaten pekalongan.

Seluruh tahapan diatas telah berjalan sesuai dengan hierarki yang ada di struktural pemerintahan kabupaten pekalongan. Namun hal yang harus digaris bawahi terhadap proses perumusan agenda ini

adalah keterlibatan masyarakat yang tidak ada menjadikan kebijakan publik ini terlihat tidak sempurna. Hal ini disebabkan karena masyarakat adalah sasaran utama terhadap adanya agenda-agenda publik. Mereka inilah yang akan mendapatkan dampak baik maupun buruknya. Sehingga dengan ini, seharusnya pemerintah kabupaten melibatkan unsur masyarakat saat melakukan pengambilan keputusan atas pengadaan agenda publik. Hal ini dimaksudkan agar adanya ketersalingan antara pemangku kebijakan dengan penerima kebijakan dan dengan inipula keharmonisan dimasyarakat akan dapat terwujud.

Kemudian hal lain yang menarik dari proses perumusan kebijakan ini adalah bahwasanya hingga pada tahun 2024 proses perumusan kebijakan masih stagnan pada empat tahapan dan menyisahkan satu tahapan formulasi yaitu penilaian kebijakan. Hal ini dikarenakan proses penataan kawasan alun-alun yang belum sepenuhnya selesai, karena penataan pembangunannya direncanakan berjalan dengan empat tahap dan saat ini hanya baru berada pada pembangunan tahap kedua.

Selain itu, melalui hasil wawancara yang mendalam oleh peneliti dengan narasumber dapat disimpulkan pula bahwa dalam proses perumusan kebijakan ini hadir atas ide dari Ibu Bupati Fadia Arafiq yang mendapat dukungan penuh dari pegawai dibawahnya dan bukan dari masyarakat. Sehingga dengan ini dapat disimpulkan bahwa

kebijakan publik ini bersifat tumpul kebawah yaitu dari pemilik jabatan ke masyarakat luas.

### **E. Tujuan Pembangunan Monumen Al-Qur'an**

Pembangunan monumen yang menjadi bagian dari penataan kawasan alun-alun kabupaten pekalongan tentunya memiliki tujuan yang telah disepakati oleh pemerintah kabupaten pekalongan. Berdasarkan wawancara yang mendalam oleh peneliti dengan beberapa narasumber telah ditemukan hasil bahwa pembangunan monumen al-qur'an memiliki dua tujuan yaitu :

#### **1. Pembangunan Icon Kabupaten Pekalongan**

Proses pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang diawali dengan peresmian penggunaan gedung sekretariat daerah kabupaten pekalongan di Kajen terjadi pada tanggal 25 agustus 2001. Memasuki tahun 2021, maka kajen telah menjadi pusat pemerintahan kabupaten selama 20 tahun. Hal ini pula yang menjadi dasar bahwa kini sudah waktunya kabupaten pekalongan harus memiliki ciri khas daerah atau Icon daerah layaknya daerah-daerah lain (Kuncoro, 2024).

Sesuai pernyataan dari Dinas Penataan Umum dan Tata ruang bahwa keberadaan alun-alun yang hanya sebatas lapangan kosong sudah dinilai tidak relevan oleh Pemkab. Kemudian posisi luas tanah alun-alun kajen yang sangat luas hingga mencapai 4,7 hektar mendukung atas adanya usulan untuk dilakukan

pembangunan Icon bagi Kabupaten Pekalongan. Hal ini disebabkan karena sudah puluhan tahun kabupaten pekalongan terasa tertinggal dengan kota dan daerah lain sehingga pada masa pemerintahan era Bu Fadia Arafiq, Pemkab siap untuk mengalokasikan dana APBD yang ada untuk membuat Icon Kabupaten demi pembangunan dengan jangka panjang (Kuncoro, 2024).

Pengambilan keputusan terhadap bentuk icon yang berupa Monumen Al-Qur'an ini sejalan dengan sejarah yang mengatakan bahwa kabupaten pekalongan adalah kota santri (Asidiq, 2024). Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan monumen al-qu'an adalah agenda pemkab untuk meningkatkan daya tarik dan untuk mendukung branding yang telah ada bagi kabupaten pekalongan itu sendiri.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Sesuai pernyataan dari Asisten 2 Bupati Bidang Pembangunan dan Perekonomian Kabupaten Pekalongan bahwasanya segala pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemkab selalu mengarah ke sektor ekonomi maka begitupula yang terjadi dengan pembangunan monumen al-qur'an. Adanya agenda ini selain untuk membangun Icon ciri khas daerah adalah untuk sebagai langkah yang diambil untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi di kabupaten pekalongan. Maksud dan

tujuan yang juga menjadi alasan atas agenda ini adalah dengan adanya rencana terhadap penataan PKL dan pengadaan UMKM di sekitar lokasi alun-alun (Kuncoro, 2024) Sehingga dengan demikian inilah yang dimaksud dengan tujuan jangka panjang terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

“Saat ini pembangunan penataan kawasan alun-alun baru berada pada tahap kedua dimana baru pembangunan monumen dan taman. Masih ada dua tahap lagi yang akan dilakukan oleh Pemkab yaitu terkait perbaikan jalan trotoar disebelah timur, barat dan utara serta pembangunan toko/ruko untuk penertiban PKL dan UMKM yang ada di kabupaten pekalongan” (Asidiq, 2024).

Pada tahun 2024 proses pembangunan penataan kawasan alun-alun memang sudah bisa dikatakan selesai. Bahkan saat ini setelah adanya monumen dan taman-taman yang dibangun oleh Pemkab berhasil menambah daya tarik alun-alun bagi masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Arum selaku pedagang kaki lima dan bu Rini selaku pedagang bakso kuah disekitar lokasi yang mengakui bahwa pendapatan mereka semakin bertambah setelah adanya penataan kawasan alun-alun. Bahkan tingkat mobilitas dialun-alun yang dahulu hanya sampai dijam 10 kini hingga berada pukul 2 pagi masih ada pengunjung yang suka bersantai alun-alun (Rini & Arum, 2024).

Berdasarkan pernyataan seluruh narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penetapan agenda ini adalah untuk membangun icon dan ciri khas kabupaten pekalongan

sebagai kota santri sekaligus untuk pemerataan pembangunan dengan jangka panjang yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian khususnya pendapatan masyarakat sekitar.

Pemilihan icon yang berupa Monumen Al-Qur'an adalah hal yang terkesan salah tapi tidak salah dan benar tapi tidak sepenuhnya benar. Hal ini dikarenakan pemilihan Icon Al-Qur'an sudah sejalan dengan sejarah yang ada yaitu kabupaten pekalongan yang dikenal dengan sebutan kota santri. Namun meskipun dengan demikian, pemilihan Icon yang berbentuk seperti kitab Al-Qur'an ini dapat menimbulkan masalah baru, karena di kabupaten pekalongan tidak 100% beragama islam dan hal ini dapat terkesan mengesampingkan masyarakat yang memeluk agama lain. Tetapi dari hal ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sikap toleransi antar beragama yang ada di kabupaten pekalongan ternyata cukup besar karena setelah peresmian pembangunan monumen hingga saat ini tidak ada masyarakat non muslim yang mengkritisi atas hal tersebut.

Selain itu, tujuan pemkab yang menginginkan dengan adanya pembangunan ini akan berdampak pada sektor perekonomian juga sudah sedikit menunjukkan hasil. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah pengunjung yang dari hari ke hari semakin mengalami peningkatan terutama pada setiap hari sabtu dan minggu. Sehingga dengan ini berdampak pula terhadap

tingkat mobiltas yang semakin meningkat serta sejalan dengan adanya peningkatan pendapatan pedagang kaki lima disekitar alun-alun.

Fenomena tentang peningkatan perekonomian akibat daya tarik alun-alun sebagaimana diatas sesuai dengan perintah dari Allah Swt yang tertulis pada ayat Al- Jumuah (10) .

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“ Maka jika selesai salat, maka bertebaranlah kamu sekalian di bumi dan mencari dari keutamaan Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung” (QS al Jumu’ah 10).

Ayat tersebut mengandung perintah supaya bertebaran di muka bumi. Maksudnya adalah mencari rizqi yang halal sehingga ekonomi bisa bangkit. Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi pada pembangunan monumen al-quran di alun-alun kajen yang memiliki sifat pembangunan berkelanjutan. Bahwa semenjak adanya pembangunan ini banyak masyarakat yang membuka usaha secara halal yaitu dengan berjualan disekitar lokasi sehingga dengan ini dapat membangkitkan perekonomian kehidupan mereka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Aktor yang terlibat dalam proses perumusan pembangunan monumen al-qur'an berjumlah 12 aktor. Seluruh aktor ini berasal dari sebelas lembaga eksekutif (Bupati, Sekretariat Daerah kabupaten Pekalongan, Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan, DPU TARU, Dinas LH, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Kementerian Agama), satu lembaga legislatif (DPRD Kabupaten Pekalongan) tanpa adanya unsur aktor lain.
2. Pembangunan monumen al-qur'an adalah sebagian dari agenda publik yang berada pada program penataan kawasan alun-alun kabupaten pekalongan. Agenda ini lahir dengan menggunakan empat tahapan penyusunan kebijakan publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan implementasi kebijakan dengan menyisakan satu tahapan yaitu tahap penilaian kebijakan. Hal ini dikarenakan hingga tahun 2024 pembangunan penataan kawasan alun-alun kabupaten pekalongan masih terus berjalan dan ada 2 tahapan pembangunan yang belum diselesaikan.
3. Pembangunan monumen al-quran memiliki dua tujuan yaitu untuk menciptakan Icon Kabupaten Pekalongan sebagai daya tarik dan

meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Selama pasca peresmian penataan kawasan alun-alun pada tahun 2023, kini kedua tujuan tersebut sudah bisa untuk dikatakan tercapai. Peningkatan jumlah pengunjung, jumlah pedagang kaki lima, tingkat mobilitas terus bertambah dari hari ke hari sehingga hal ini cukup menjadi bukti bahwa tujuan pemkab dalam pengadaan agenda ini telah terwujud.

4. Pembangunan ini telah sesuai dengan unsur pembangunan syariah yaitu pembangunan dengan bersifat berkelanjutan yang berdampak kepada terbukanya peluang dalam mencari rizqi yang halal sesuai dengan QS. Al Jumuah 10.

## **B. Saran**

1. Peneliti selanjutnya diharapkan mencari dan mengkaji lebih banyak data dari seluruh narasumber yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan agar hasil penelitiannya lebih dalam dan lebih baik lagi.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan melebarkan pencarian data ke lingkup masyarakat umum, organisasi kepemudaan, ataupun organisasi kemasyarakatan untuk mendapatkan data yang lengkap agar hasil penelitiannya lebih sempurna.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan melebarkan pencarian data ke lingkup perguruan tinggi disekitar lokasi untuk melihat keterlibatan unsur akademisi dalam penyusunan kebijakan agar hasil penelitiannya lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. (2022). *Alun-Alun Kajian Bakal Dilengkapi Ikon Alquran dan Air Mancur Warna-Warni*.  
<https://radarsemarang.jawapos.com/kajian/721399621/alunalun-kajian-bakal-dilengkapi-ikon-alquran-dan-air-mancur-warna-warni>
- Ahmad, N. R. (2023). *Permukiman Kumuh di Kabupaten Pekalongan Masih 344,21 Ha, Penanganan Dinilai Lambat*.  
<https://radarsemarang.jawapos.com/kajian/721720775/permukiman-kumuh-di-kabupaten-pekalongan-masih-34421-ha-penanangan-dinilai-lambat>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anjarwati, F. I. (2013). Analisis Peran Aktor Dalam Proses Agenda Setting Perumusan Kebijakan Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. *NBER Working Papers*, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Arum. (2024). *Hasil wawancara dengan PKL di sekitar alun-alun kabupaten pekalongan*.
- Asidiq, M. H. (2024). *Hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan*.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan tantangan ekonomi*. Gema Insani.
- Dunn, W N. (2000). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dunn, Willim N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. In *Gadjah Mada Universitas Press* (pp. 1–710). <https://www.pdfdrive.com/pengantar-analisis-kebijakan-publik-e176089208.html>
- Fauzi, A. N., & Rostyaningsih, D. (2018). Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/22052/20296>
- Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2003). *Manajemen syariah dalam praktik*. Gema Insani. <https://books.google.co.id/books?id=PRFfhYdzyawC>
- Hamidi, M. L. (2003). *Jejak-jejak ekonomi syariah*. Senayan Abadi Pub.

- Haniza, T. Z., Widowati, N., & Maesaroh, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Pada Industri Batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 11(3), 1–20.
- Haryanto, W. (2024). *Hasil wawancara dengan kepala bidang ekonomi dan infrastruktur BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan*.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (1995). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (Vol. 3). Oxford university press Toronto.
- Husnul Yakin, Susi Sulandari, D. L. J. (2013). *Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kemijen, Kota Semarang*.
- Karya, D. J. C. (2023). *Sosialisasi Penataan Pedagang Dan Peninjauan Pasar Wiradesa*. <https://ciptakarya.pu.go.id/berita-detail?12904&satker=505843>
- Khaeruddin, N. (2023). *292 Jalan Poros Desa Diambil Alih Pemkab. Bupati Pekalongan : Supaya Bisa Segera Diperbaiki*. 11 Oktober. <https://pantura.suaramerdeka.com/panturaraaya/0610464472/292-jalan-poros-desa-diambil-alih-pemkab-bupati-pekalongan-supaya-bisa-segera-diperbaiki>
- Kuncoro, W. (2024). *Hasil wawancara dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pekalongan*.
- Kutnadi. (2021). *3 program unggulan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq*. 29 Juni. <https://jateng.antaranews.com/berita/389586/mi-dia-3-program-unggulan-bupati-pekalongan-fadia-arafiq>
- Mahardhani, A. J., Sulton, S., & Sunarto, S. (2020). Peran Civil Society Organization (Cso) Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Kajian Di Kabupaten Ponorogo). *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(2), 59. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n2.p59-62>
- Mahmud, F. L. (2020). Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik (Studi Kasus Kebijakan Permukiman Di Provinsi Dki Jakarta). *Journal of Politic and Government Studies*, 9(02), 231–240. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/27319>
- Mulyana, D. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif: paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*. PT Remaja Rosdakarya. <https://books.google.co.id/books?id=ohGfAQAACAAJ>
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik( Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.
- Nahariah, N., & Nursaifullah, N. (2021). Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Formulasi Kebijakan Di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 65–74. <https://doi.org/10.33648/jtm.v2i2.199>
- Paramita, C. C. G., Santoso, R. S., & Hanani, R. (2017). *Peran Aktor Lokal Dalam Formulasi Kebijakan Ex Officio Di Kota Batam*.

- Pekalongan, R. (2022). *2022 Jumlah Kasus Gizi Buruk Meningkat*. 26-07. <https://radarpekalongan.disway.id/read/9012/2022-jumlah-kasus-gizi-buruk-meningkat>
- Prokompin. (2022). *Kabupaten Pekalongan Raih Penghargaan Pembangunan Daerah*. 14 April. 27 November 2023
- Purnomo, I. D. (2023). *Komisi III DPRD Kabupaten Pekalongan Pertanyakan Proyek Rehabilitasi Alun-alun Kajen Artikel ini telah tayang di Tribun-Pantura.com dengan judul Komisi III DPRD Kabupaten Pekalongan Pertanyakan Proyek Rehabilitasi Alun-alun Kajen*, <https://pantura.tribunnews.com/2023/01/06/komisi-iii-dprd-kabupaten-pekalongan-pertanyakan-proyek-rehabilitasi-alun-alun-kajen?page=all>, 6 Januari.
- Rini. (2024). *Hasil wawancara dengan PKL disekitar alun-alun kabupaten pekalongan*.
- Rini, & Arum. (2024). *Hasil wawancara dengan PKL disekitar alun-alun kabupaten pekalongan*.
- Roshanti, D., Laili, R. N., Munif, B., & Habibitasari, B. B. (2022). Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Pogram Sekardadu (Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai di Banyuwangi). *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(3), 56–70. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v1i3.129>
- RPJMD Kabupaten Pekalongan. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021–2026*.
- Sagala, A. (2016). Model Otonomi Daerah Pada Masa Orde Lama Orde Baru dan Reformasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*, 3(2), 1–15.
- Salaputa, I., Madani, M., & Prianto, A. L. (2013). Peran Aktor Dalam Penyusunan Agenda Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Maluku Tengah. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 35–47. <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.56>
- Sore, U. B. (2017). *Kebijakan Publik* (Vol. 1). Sah Media.
- Sumarrosul. (2024). *Hasil Wawancara dengan Wakil DPRD Kabupaten Pekalongan*.
- Toni. (2022). *Pemkab Pekalongan Ciptakan Program Unggulan Berkomitmen Wujudkan Masyarakat yang Setara*. 17 Desember. <https://www.sorotnews.co.id/2022/12/17/pemkab-pekalongan-ciptakan-program-unggulan-berkomitmen-wujudkan-masyarakat-yang-setara/>
- Wibowo, U. B. (2013). Intensitas Peran Aktor Kebijakan dan Kekuatan Politis dalam Perumusan Kebijakan Sertifikasi Pendidik. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 6(1), 11–20.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. (No Title).
- Winengan. (2016). Kuasa Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Publik Di Aras Lokal ( Studi Pada Kebijakan Pembebasan Lahan Kawasan Mandalika Resort di Lombok ) Winengan Universitas Islam Negeri Mataram. *Jurnal Review Politik*, 06(2), 367–387.

Yulieth-Rafael, 2020. (2020). Studi Kebijakan Publik : Revitalisasi Pasar Kajen Kabupaten Pekalongan. *Studi Kebijakan Publik : Revitalisasi Pasar Kajen Kabupaten Pekalongan. Angewandte Chemie International* EYulieth-Rafael, 2020. (2020). *Studi Kebijakan Publik : Revitalisasi Pasar Kajen Kabupaten Pekalongan. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 95.

Zakaria, A. V., Anwar, S. A. ., & Anwar, B. T. H. (2023). *Analisis Kawasan Permukiman Kumuh Dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan (Studi Kasus Kelurahan Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)*. 3(6), 627–635.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1

### Pedoman Wawancara

#### Daftar Pertanyaan Wawancara

#### Tentang Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan

#### Terhadap Aktor Kepemerintahan

1. Siapa awal mula yang memberikan ide mengenai pembangunan ini?
2. Bagaimana respon pertama Bapak/Ibu pasca mendengar ide terkait pembangunan Monumen tersebut?
3. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses penetapan agenda?
4. Siapa pihak yang pro terhadap rencana pembangunan Monumen al-qur'an ?
5. Siapa pihak-pihak yang sempat kontra terhadap agenda ini?
6. Siapa pihak yang mampu menjelaskan masalah di kabupaten pekalongan pada saat itu?
7. Adakah tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan Monumen al-qur'an?
8. Setelah agenda ini disepakati, pihak instansi apa yang ditunjuk sebagai pihak pengelola dari pelaksanaan pembangunan Monumen ini?

Daftar Pertanyaan Wawancara  
Tentang Gambaran Proses Perumusan Kebijakan  
Terhadap Aktor Kepemerintahan

1. Kapan kebijakan pembangunan Monumen ini mulai didiskusikan?
2. Bagaimana peran instansi Bapak/Ibu dalam penetapan agenda pembangunan ini?
3. Kapan pertama kali instansi Bapak/Ibu mendapat undangan rapat dari diskusi agenda ini?
4. Berapa lama proses diskusi penetapan agenda ini berlangsung?
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai alur diskusi dan alur penetapan agenda yang telah berlangsung dari kebijakan publik ini?
6. Hal apa yang sempat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembangunan Monumen al-qur'an?
7. Hal apa yang menjadi alasan sehingga agenda ini disepakati oleh pihak instansi Bapak/Ibu?
8. Bagaimana alur jalan dari proses diskusi dalam penetapan agenda ini?

Daftar Pertanyaan Wawancara  
Tentang Tujuan Perumusan Kebijakan  
Terhadap Aktor Kepemerintahan

1. Apa tujuan jangka pendek dari pembangunan Monumen al-qur'an ini?
2. Apa tujuan jangka panjang dari pembangunan Monumen al-qur'an ini?
3. Bagaimana proses pengelolaan yang akan dilaksanakan terhadap Monumen ini?
4. Masalah apa yang ingin diselesaikan dari penetapan agenda ini?
5. Siapa sasaran utama dari penetapan agenda pembangunan ini?
6. Bagaimana harapan Bapak/Ibu setelah adanya Monumen ini?
7. Langkah apa yang dilakukan oleh pihak pengelola untuk mewujudkan harapan tersebut?
8. Jika harapan tersebut tidak tercapai, apa yang akan dilakukan oleh pihak pengelola?

## Daftar Pertanyaan Wawancara

### Terhadap Aktor Non – Pemerintahan

1. Apakah pihak masyarakat pernah dilibatkan oleh Pemkab Pekalongan dalam penetapan agenda publik?
2. Apakah saudara/i pernah dilibatkan oleh Pemkab Pekalongan dalam penetapan agenda publik?
3. Apakah saudara/i memahami alur perumusan kebijakan publik?
4. Apakah saudara/i tahu bahwa masyarakat adalah salah satu elemen yang harus ada dalam perumusan kebijakan publik?
5. Apa manfaat dari keberadaan pembangunan ini?
6. Apa dampak dari keberadaan Monumen al-quran ini?
7. Bagaimana tanggapan saudara/i terhadap pembangunan Monumen al-qur'an di alun-alun kajeen ini?

**Transkrip Wawancara**

Jawaban Informan Wawancara Asisten 2 Bupati Pekalongan

Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Terhadap Aktor Dalam Perumusan Kebijakan

1. Ide pembangunan ini berasal dari Ibu Bupati Pekalongan periode 2020-2026.
2. Saat menyetujui gagasan tersebut karena sudah saatnya alun-alun pekalongan memang harus dipercantik.
3. Perangkat Daerah yang terlibat pada saat perumusan pembangunan ini diantaranya, Bupati, DPU TARU, Dinas LH, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM. Dinas Perhubungan, DPRD, MUI Kabupaten Pekalongan, dan saya selaku unsur dari sekretariat daerah.
4. Seluruh perangkat daerah yang ada menyetujui ide dari Ibu Bupati.
5. Tidak ada pihak yang menolak gagasan Ibu.
6. Rapat perumusan dipimpin langsung oleh Ibu dan beliau pula yang menjelaskan secara detail tentang keinginannya yang kemudian didiskusikan bersama Perangkat Daerah yang hadir.
7. Saat perumusan kebijakan, rapat hanya dilakukan bersama para Perangkat Daerah seperti yang tadi saya sebutkan.
8. Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan agenda ini adalah Dinas DPU TARU.

## Jawaban Informan Wawancara BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan

### Terhadap Aktor Dalam Perumusan Kebijakan

1. Ide agenda ini dari Ibu Bupati Fadia Arafiq.
2. Saya setuju dengan ide tersebut, karena itu ide yang bagus dan sesuai dengan permasalahan di kabupaten pekalongan.
3. Banyak pihak yang terlibat seperti dinas perhubungan, MUI dan sebagainya, namun yang jelas agenda ini ditanggung jawabi oleh DPU TARU.
4. Seluruh yang hadir saat rapat menyetujui ide tersebut.
5. Tidak ada pihak manapun yang kontra dengan ide yang ada.
6. Saat rapat penyusunan agenda dipimpin langsung oleh Ibu Bupati dan beliau yang menjelaskan langsung mengenai ide tersebut.
7. Yang merumuskan hanya para perangkat daerah yang mendapatkan undangan rapat.
8. Instansi yang bertanggungjawab adalah DPU TARU.

## Jawaban Informan Wawancara Wakil DPRD Kabupaten Pekalongan

### Terhadap Aktor Dalam Perumusan Kebijakan

1. Agenda ini merupakan ide yang dibawa oleh lembaga eksekutif yang kemudian dipresentasikan ke pihak kami.
2. Awalnya, kami tidak sepakat dengan ide ini karena menurut kami masih banyak permasalahan yang harusnya diselesaikan dahulu oleh eksekutif seperti jalan yang rusak contohnya, namun seiring dengan semakin banyak waktu dan diskusi di ruang rapat, kami akhirnya menyetujui adanya agenda pembangunan ini dengan banyak pertimbangan.
3. Banyak pihak yang terlibat, seperti pihak Bupati, Setda, Bappeda, Dinas-dinas yang terkait dan sebagainya.
4. Seluruh eksekutif sepakat dengan pembangunan ini
5. Kami adalah satu-satunya aktor yang awalnya tidak sepakat atas ide tersebut.
6. Saat presentasi agenda, hal ini disampaikan langsung oleh serda dengan bantuan dari BAPPEDA dan DPU TARU selaku lembaga yang paling berpengaruh atas agenda ini.
7. Tidak ada masyarakat yang terlibat, namun saat presentasi agenda, lembaga eksekutif mengatakan bahwa ini merupakan ide dan gagasan dari masyarakat.
8. Penanggung jawab dari agenda ini adalah DPU TARU dan LH.

Kabupaten Pekalongan

Terhadap Aktor Dalam Perumusan Kebijakan

1. Ide ini berasal dari Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
2. Saya sepakat, karena Kabupaten Pekalongan sangat membutuhkan daya tarik wilayah agar daerah kita ini mudah dikenal dimasyarakat luas seperti halnya menyebut Semarang dengan kota tuanya, Purwokerto dengan menara menyalanya begitupun Kabupaten Pekalongan yang ingin dikenal dengan monumen Al-Qur'annya.
3. Banyak sekali, seperti Setda, BAPPEDA, Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Kementerian Agama, kemudian juga DPRD tentunya.
4. Sepengetahuan saya seluruh pihak yang terlibat semuanya sepakat dengan ide ini.
5. Tidak ada pihak yang kontra.
6. Yang memimpin rapat penyusunan agenda langsung dari bupati.
7. Yang terlibat saat rapat penyusunan hanya perangkat daerah yang diundang oleh Setda.
8. Instansi yang bertanggung jawab adalah kami dan LH terkait pengelolaan taman-tamannya.

Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Terhadap Gambaran Proses Perumusan Kebijakan

1. Rapat penyusunan agenda dimulai sejak tahun 2021.
2. Saya berperan untuk mengkoordinasikan perangkat daerah yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan.
3. Kami menyebar undangan rapat perdana pada bulan juli 2021.
4. Proses diskusi hampir berjalan selama satu tahun penuh.
5. Proses perumusan sudah sebagaimana mestinya dan seluruh herarki struktural pemerintahan di kabupaten pekalongan telah menjalankan tupoksinya masing-masing.
6. Hal yang menjadi bahan pertimbangan adalah terkait daya tarik kabupaten pekalongan, value kabupaten yang dikaitkan dengan julukannya sebagai kota santri. Selain itu juga adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang akan hadir seiring dengan meningkatkan hubungan sosial disekitar alun-alun.
7. Jangka panjangnya adalah pertumbuhan perekonomian dan value kabupaten, kedua itu adalah alasan yang mendasar sehingga agenda ini dijalankan.
8. Agenda ini adalah kelanjutan dari RPJMD yang telah kami susun, dari sinilah agenda ini hadir atas ide bupati yang kemudian didiskusikan dengan perangkat daerah terkait serta kemudian dipresentasikan kepihak legislatif.

## Jawaban Informan Wawancara BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan

### Terhadap Gambaran Proses Perumusan Kebijakan

1. Perencanaan dilakukan dimulai pada tahun 2021, tepatnya bulan juli.
2. Selama rapat berlangsung, lembaga kami hanya berpedoman dengan Perda RT/RW serta RPJMD karena kedua hal itulah yang selalu menjadi patokan awal kami dalam mendiskusikan sebuah program atau kebijakan
3. Bulan juli 2021.
4. Perencanaan dari nulan 2021 sedangkan pembangunan ditahun 2022, berarti hampir 1 tahun.
5. Alur diskusi sudah sesuai. Semua yang terlibat bertugas sesuai bidangnya masing.
6. Saat diskusi agenda ini yang menjadi diskusi panjang adalah terkait teknis dilapangannya.
7. Agenda ini disepakati pihak kami dengan alasan karena program sejalan dengan RPJMD dan ini adalah agenda yang memiliki jangka panjang yang bagus.
8. Diskusi perencanaan ini berjalan seperti biasa. Kami rapatkan, kami diskusikan, semua perangkat daerah memiliki tugas masing-masing dalam menyusun agenda ini yang tentunya kemudian setelah selesai kami presentasikan ke pihak legislatif.

## Jawaban Informan Wawancara Wakil DPRD Kabupaten Pekalongan

### Terhadap Gambaran Proses Perumusan Kebijakan

1. Proses diskusi yang dilakukan oleh eksekutif sejak bulan juli 2021.
2. Kami berperan untuk memberikan masukan atas semua agenda publik yang menggunakan dana APBD. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan APBD bisa dialokasikan dengan baik dan benar sesuai dengan skala prioritas permasalahan dimasyarakat.
3. Lembaga eksekutif datang ke kami sekitar bulan November tahun 2021.
4. Proses diskusi dengan kami hampir satu bulan lebih.
5. Proses diskusi dengan pihak kami agak sedikit *alot* karena menurut kami. pemkab belum waktunya untuk mempercantik alun-alun. Namun seiring berjalannya diskusi yang dilakukan dengan waktu yang panjang ini Pemkan menunjukkan keseriusannya dan bersedia untuk menerima masukan dari kami seperti dengan adanya pembangunan yang dibagi dengan 4 tahapan dengan menggunakan skala priortas.
6. Hal yang menjadi bahan pertimbangan sehingga agenda ini disepakati diantaranya adalah maksud dan tujuannya yang memang baik. Kemudian manfaat sosial yang sangat menjanjikan, serta hal ini dapat berdampak ke pertumbuhan perekonomian sekitar lokasi.
7. Seluruh bahan pertimbangan tadi adalah alasan mengapa kami menyepakati agenda ini.
8. Proses penyusunan sudah berjalan dengan baik. Seluruh elemen yang ada telah terlibat dan ini telah sesuai dengan sebagaimana mestinya.

## Jawaban Informan Wawancara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### Kabupaten Pekalongan

#### Terhadap Gambaran Proses Perumusan Kebijakan

1. Bulan juli 2021.
2. DPU TARU bertugas sebagai tim teknisi sekaligus mengawal proses pekerjaan dan pembangunan.
3. Kami mulai mengikuti rapat ini semenjak bulan juli 2021.
4. Proses diskusi hampir berjalan satu tahun, mulai dari juli 2021 hingga pembangunan dilaksanakan pada juli 2022.
5. Proses diskusi berjalan cukup lama. Pada setiap bulannya kami hampir 2-3 kali selalu melakukan rapat penyusunan agenda ini.
6. Hal menjadi bahan pertimbangan adalah kabupaten pekalongan memang terlihat tidak memiliki daya tarik seperti dikota/kabupaten lain. Selain itu pe dari monumen al-qur'an pun sempat didiskusikan dengan sangat lama, karena hal tersebut ada kaitannya dengan kitab al-qur'an maka disini kami juga melibatkan dari kementrian agama.
7. Kabupaten pekalongan memang membutuhkan daya tarik dan icon daerah untuk meningkatkan branding di masyarakat luas dan hal ini berdampak pada pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar. Maka kedua hal ini adalah alasan mengapa pembangunan ini dilaksanakan.
8. Alur diskusi sudah sesuai dengan seharusnya. Kami seluruh perangkat daerah menjalankan tugas kami sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

## Jawaban Informan Wawancara Asisten 2 Bupati Pekalongan

### Bidang Perekonomian dan Pembangunan

#### Terhadap Tujuan Proses Perumusan Kebijakan

1. Tujuan jangka pendek dari pembangunan ini adalah pembuatan icon kabupaten pekalongan.
2. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah alun-alun menjadi tempat berkumpul masyarakat yang dimana dari hal ini akan berdampak pada sektor ekonomi masyarakat.
3. Yang jelas tahap pengelolaan yang harus dilakukan adalah dengan tidak merusak bangunan yang telah ada.
4. Permasalahan yang ingin diselesaikan dari penetapan agenda ini adalah branding dari kabupaten pekalongan yang kalah dengan daerah lain.
5. Sasaran utama kami adalah terkait dengan pengadaan infrastruktur publik dan penataan tata ruang untuk kesejahteraan masyarakat dikabupaten pekalongan.
6. Harapan kami, pembangunan monumen ini benar-benar berdampak pada sisi perekonomian masyarakat sehingga dapat membawa manfaat yang baik.
7. Terkait pengelolaan dilapangan, itu adalah tugas dari DPU TARU.
8. Tentunya memperbaiki bagian-bagian yang salah jika memang ada.

## Jawaban Informan Wawancara BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan

### Terhadap Tujuan Proses Perumusan Kebijakan

1. Tujuan dari pembangunan ini adalah mempercantik alun-alun agar lebih indah.
2. Tujuan jangka panjangnya dengan alun-alun semakin bagus dapat menarik pengunjung yang nantinya berdampak pada sektor perekonomian.
3. Pengelolaan sepenuhnya menjadi tugas DPU TARU dan LH.
4. Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah tentang penataan kawasan tata ruang khususnya pengadaan infrastruktur publik di kabupaten pekalongan.
5. Sasaran utama dari agenda ini tentu adalah keharmonisan masyarakat. Kami ingin mesyarakat menjadi nyaman ketika berkunjung dan bermain di sekitar kawasan alun-alun.
6. Harapan kami bangunan ini dijaga dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana mestinya.
7. Untuk pengelolaan tentunya DPU TARU akan menjaga dengan baik.
8. Ketika ada hal-hal yang rusak dan menimbulkan permasalahan, kami selaku pemerintah kabupaten siap untuk memperbaiki agar tujuan dari pembangunan ini bisa terwujud.

## Jawaban Informan Wawancara Wakil DPRD Kabupaten Pekalongan

### Terhadap Tujuan Proses Perumusan Kebijakan

1. Tujuan jangka pendeknya adalah menata kawasan alun-alun agar lebih indah.
2. Jangka panjangnya adalah dari hal tersebut, dapat menimbulkan daya tarik dan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat sekitar.
3. Untuk pengelolaan itu tentunya tugas dari DPU TARU dan LH selaku pelaksana pembangunan.
4. Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah peningkatan branding dan pembuatan icon daerah.
5. Sasaran dari pembangunan ini tentunya adalah masyarakat.
6. Harapan saya, pembangunan ini benar-benar bermanfaat baik untuk masyarakat kabupaten, minimal untuk para pedagang kaki lima disekitar alun-alun.
7. Menjaga dengan baik dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama merawat apa yang sudah disediakan oleh pemkab.
8. Kami siap memperbaiki dan melakukan evaluasi jika pembangunan ini gagal bahkan tidak membawa dampak yang baik bagi masyarakat.

## Jawaban Informan Wawancara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### Kabupaten Pekalongan

#### Terhadap Tujuan Perumusan Kebijakan

1. Tujuan jangka pendeknya adalah pembangunan icon kabupaten pekalongan sebagai kota santri.
2. Tujuan jangka panjangnya adalah peningkatan perekonomian masyarakat kabupaten pekalongan.
3. Pengelolaan ini harus dilaksanakan dengan kolaborasi dari seluruh elemen, baik dari perangkat daerahnya ataupun masyarakatnya.
4. Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah menata kawasan alun-alun agar lebih indah dan rapih.
5. Sasaran utama kami adalah masyarakat.
6. Harapan kami dengan adanya pembangunan ini kabupaten pekalongan semakin maju.
7. Langkah yang dilakukan pengelola adalah dengan mempermudah perizinan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha disekitar kawasan alun-alun.
8. Jika harapan dari tujuan pembangunan ini tidak tercapai, maka kami siap melakukan evaluasi atas pembangunan yang telah dilaksanakan.

## Jawaban Informan Wawancara Ibu Rini (Pedagang Kaki Lima)

### Terhadap Aktor, Proses serta Tujuan Perumusan Kebijakan

1. Saya sudah 7 tahun disini, tapi setahu saja, pedagang disini tidak ada yang diajak untuk diskusi.
2. Saya tidak pernah terlibat sama sekali dan saya kira itu adalah tugas mereka yang memiliki jabatan mba, misalpun saya diajak diskusi juga saya tidak akan paham soalbegituan.
3. Saya tidak tahu tentang begitu-begituan .
4. Saya tahu, tapi saya bukan rakyat yang dekat dengan para pejabat jadi ya saya tidak diajak diskusi itu wajar .
5. Mempercantik alun-alun saja si sepertinya.
6. Banyak pengunjung yang datang dan itu berdampak pada jumlah pembeli bagi pedagang kaki lima disini.
7. Bangunan monumen berhasil menjadi daya tarik masyarakat sehingga banyak pengunjung yang datang kesini.

Jawaban Informan Wawancara Ibu Rini (Pedagang Kaki Lima)

Terhadap Aktor, Proses serta Tujuan Perumusan Kebijakan

1. Saya sudah 7 tahun disini, tapi setahu saja, pedagang disini tidak ada yang diajak untuk diskusi.
2. Saya tidak pernah terlibat sama sekali dan saya kira itu adalah tugas mereka yang memiliki jabatan mba, misalpun saya diajak diskusi juga saya tidak akan paham soalbegituan.
3. Saya tidak tahu tentang begitu-begituan .
4. Saya tahu, tapi saya bukan rakyat yang dekat dengan para pejabat jadi ya saya tidak diajak diskusi itu wajar .
5. Mempercantik alun-alun saja si sepertinya.
6. Banyak pengunjung yang datang dan itu berdampak pada jumlah pembeli bagi pedagang kaki lima disini.
7. Bangunan monumen berhasil menjadi daya tarik masyarakat sehingga banyak pengunjung yang datang kesini.

## Jawaban Informan Wawancara Ibu Arum (Pedagang Kaki Lima)

### Terhadap Aktor, Proses serta Tujuan Perumusan Kebijakan

1. Seingat saya lapangan disini mulai ditutup *pager* proyek itu dari bulan juli 2022, tapi saya ya hanya pedagang kecil yang idak pernah diajak diskusi.
2. Saya sudah berjualan disini hingga 20 tahun lebih, tapi saya tidak pernah diajak diskusi dan saya juga tidak tahu soal adanya rencana pembangunan monumen itu mba.
3. Saya tidak tahu secara menyeluruh
4. Saya tahu kalau rakyat adalah bagian dari orang yang harusnya terlibat.
5. Yang saya rasakan, manfaat dari bangunan ini untuk menarik perhatian masyarakat supaya mau berkunjung ke alun-alun.
6. Pembangunan ini berdampak sekali untuk para pedagang kaki lima disini. Kemarin saat proses pembangunan banyak pekerja proyek yang disini itu juga bagian dari tambahan jumlah pelanggan saya. Bahkan karena banyak para pengunjung yang datang, pendapatan kmai semakin bertambah. Bahkan jumlah pedagangpun semakin bertambah banyak, mereka berbondong-bondong datang untuk berjualan disini padahal mereka berasal dari wiradesa, bojong, kedungwuni yang jaraknya lumayan jauh dari alun-alun.
7. Ini program yang bagus. tinggal bagaimana terkait keberadaan para pedagang disini saja, mau dirapihkan atau memang dibiarkan berceceran seperti ini.
8. Mempersantik alun-alun saja si sepertinya.

9. Banyak pengunjung yang datang dan itu berdampak pada jumlah pembeli bagi pedagang kaki lima disini.
10. Bangunan monumen berhasil menjadi daya tarik masyarakat sehingga banyak pengunjung yang datang kesini.

## Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Pahlawan KM 6 Rowotaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.febi.uingusdur.ac.id email: febi@uingusdur.ac.id

Nomor : B-221/Un.27/J.IV.1/TL.00/02/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Ijin Penelitian

12 Februari 2024

Yth. Kepada Bapak/Ibu  
BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan  
di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Zakirotul Khasanah  
NIM : 4120040  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul "Analisis Peran Aktor Dalam Perumusan Pembangunan Monumen Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan "

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
	Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H NIP. 197502201999032001
	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan  
sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi  
elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)  
hingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



## Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



### PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Krakatau No. 9 Kajen  
Telepon (0285) 381456, 381010. Faks. (0285) 381789  
Website : <https://bapperida.pekalongankab.go.id> Email : [bapperida@pekalongankab.go.id](mailto:bapperida@pekalongankab.go.id)

#### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 000.9.2/79/V/2024

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Nomor: B-221/Un.27/J.IV.1/TL.00/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 Perihal Izin Penelitian, kami yang bertandatangan dibawah ini dengan ini menerangkan bahwa

1. Nama : Zakirotul Khasanah
2. NIM : 4120040
3. Program Studi : Ekonomi Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Judul Penelitian : Analisis Peran Aktor Dalam Perumusan Pembangunan Monumen Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan

telah melakukan penelitian dalam rangka menyusun laporan Proyek Akhir/Skripsi mahasiswa S1 Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, pada tanggal 12 Februari s.d 25 April 2024.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kajen, 06 Mei 2024

a.n. KEPALA BAPPERIDA

KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah



Dr. Herosakti Gatriyo, S.STP, M.M.

Penata

NIP 199309082015071001

Tembusan :

1. Sdr. ZAKIROTUL KHASANAH, tersebut.

Lampiran 5

Dokumentasi

**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
 Jl. Krakatau No. 9 Telp. (0295) 381450, 3801010 Fax. (0295) 381789 Kode Pos 51161  
 e-mail : bappeda\_kabpa@yahoocpni

**K A J E N**

**LEMBAR PROPOSISI**

Surat Asal	M. TDA	Ditentukan Tanggal	27 Juli 2021
Nomor	005/02814	Tgl Agenda	905
Tanggal	22 Juli 2021	SIK	a. Sangat Segera b. Segera c. Rutin
Perihal	Undangan Rapat Koordinasi Penataan Pedegangan Kawasan (PPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Alokasi Ruang) (Amanat, 23 Juli 2021 Pukul 08.00 WIB s.d. selesai) Tempat: RRI Asisten Ekonomis dan Pembangunan Sekda Kab Pekalongan		
Ditujukan Kepada	Dengan Hormat Bangs		
DIREKTORIS Kabid. Litbang Kabid. Ekonomi dan Infrastruktur Kabid. Program dan Manaj Kabid. Pembastud	Camat & Kepala Hadiri & Perwakilan Kepala Badan Koordinator & Timor Lanjut Kas. Terpadu & Saran	Perekonomi Pembangunan	
Cocokan	M. Yuliani Akbar, S.Sos, M. Si NIP. 50780710 100003 1 010		

93	21 Juli 2021	976 / 126	Pelaporan Tahun 2021 Laporan Kegiatan Dana Bagi Hasil Lada Hasil Tambak (DHB LHT)	Kepala Bagian SETDA SETDA
	23 Juli 2021	005 / 02796	Undangan dalam rangka kunjungan kerja Bupati ke Kec. Petungkilana, untuk secara langsung bertemu dan secara langsung membahas kegiatan DHB LHT pada SKPP Kab Pekalongan TA 2021 (Kamis, 22 Juli 2021, pukul 10.00 WIB - selesai, tempat: Wisma Tiga Rupa Desa Tinggipaku Kc. Petungkilana)	
95	22 Juli 2021	008 / 02814	undangan Rapat Koordinasi Perencanaan FKL di lingkungan Pemerintah Kab. Pekalongan, Aula - Aula Jajan (Sabtu, 23 Juli 2021, pukul 08.00 WIB s.d. selesai, Tempat: RR Asisten Ekonomi & Pembangunan Sekda Kab Pekalongan)	SETDA
96	21 Juli 2021	005/9562/Pelpan	Undangan Rapat Sinkronisasi Program kegiatan Tahun 2022 Terkait Rencana Aksi Kegiatan dan Peningkatan Extreme Weather Ketersediaan yang meliputi pada Terorisme di Daerah Istimewa, 26 Juli 2021, pukul 10.00 s.d 12.00, Rapat dilaksanakan melalui Zoom Meeting.	Kemendagri Jenderal Pemerintahan
	21 Juli 2021	001/02019	Undangan Rapat dalam Percepatan Penyaluran Dana Dana TA 2021 dan Alokasi Dana Desa (Amanat, 23 Juli 2021, pukul: 11.00 WIB s.d. Selesai, Tempat: Aula Lt.1 Sekda Kab. Pekalongan)	SETDA
98	21 Juli 2021	001/02019	Undangan Rapat dalam Percepatan Penyaluran Dana Dana TA 2021 dan Alokasi Dana Desa (Amanat, 23 Juli 2021, pukul: 11.00 WIB s.d. Selesai, Tempat: Aula Lt.1 Sekda Kab. Pekalongan)	Kemendagri















## Lampiran 6

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

#### A. IDENTITAS

1. Nama : Zakirotul Khasanah
2. Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 20 Februari 2001
3. Alamat rumah : Jl. Innova III Desa Wiradesa
4. Alamat tinggal : Dk. Sigandek, Rt 23/Rw 05, Ds. Wiradesa, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan
5. Nomor Handphone : 085740804831
6. E-mail : [zakirotul20@gmail.com](mailto:zakirotul20@gmail.com)
7. Nama ayah : Cufrihardi
8. Nama ibu : Roliyah

#### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri Kadipaten (2008-2014)
2. SMP : SMP Negeri 2 Wiradesa (2014-2017)
3. SMK : SMK Negeri 1 Sragi (2017-20220)

#### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. HMJ Ekonomi Syariah, Koordinator Departemen Sumber Daya Insani (2021-2022)
2. DEMA FEBI, Koordinator Departemen Dalam Negeri (2022-2023)
3. PMII Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam, Koordinator Kaderisasi (2022-2023)
4. PMII PK Ki Ageng Ganjur, Koordinator Kaderisasi (2023-2024)

Pekalongan, 7 Mei 2024



Zakirotul Khasanah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zakirotul Khasanah  
NIM : 4120040  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah  
E-mail address : zakirotulhasanah@mhs.uingusdur.ac.id  
No. Hp : 085740804831

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS PERAN AKTOR DALAM PERUMUSAN PEMBANGUNAN MONUMEN  
AL-QUR'AN KABUPATEN PEKALONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Juni 2024

( Zakirotul Khasanah )